

# STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA

## 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA**

# STATISTIK PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA

# 2016



---

## **INDIKATOR PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA 2016**

ISSN : 2477-4154  
No.Publikasi : 94520.1705  
Katalog : 4302002.94  
Ukuran Buku : B5  
Jumlah Halaman : x + 60

Naskah :  
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :  
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :  
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.**

## KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Pendidikan Provinsi Papua 2016 merupakan publikasi kesembilan yang diterbitkan sejak tahun 2007 dan diharapkan akan menjadi publikasi rutin, sehingga dapat dilihat perkembangan indikator pendidikan secara berkesinambungan. Publikasi ini merupakan hasil pengolahan data primer yang dikumpulkan BPS Provinsi Papua melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang rutin dilaksanakan setiap tahun serta data sekunder dari instansi terkait lainnya.

Menyadari adanya berbagai keterbatasan, BPS Provinsi Papua terus berusaha menyediakan data, menerbitkan publikasi, serta memberikan ulasan berbagai data hasil survei, supaya data yang disajikan lebih mudah dipahami bagi para pengguna. Diharapkan, publikasi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan perencanaan dalam menyusun berbagai program dan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, menuju peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari masih banyak kekurangannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan penerbitan publikasi di masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penerbitan publikasi ini disampaikan terima kasih.

Jayapura, Agustus 2017  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Papua,



**Drs. Simon Sapary, M.Sc**  
NIP.19660607 199302 1 001

## DAFTAR ISI

Halaman Katalog	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel Lampiran	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang	1
Tujuan Penulisan	2
Ruang Lingkup	2
Sistematika Penulisan	2
<b>BAB 2 METODOLOGI</b>	
Sumber Data	3
Metode Pengumpulan Data	3
Cakupan Sampel	3
Metode Analisis	5
Konsep dan Definisi	6
Partisipasi Sekolah	6
Jenjang Pendidikan	7
Jenjang dan Jenis Pendidikan Tertinggi yang pernah/sedang diduduki	7
Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	9
Kemampuan Membaca dan Menulis	10
<b>BAB 3 PARTISIPASI SEKOLAH</b>	
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12
Angka Kesiapan Sekolah	16
Partisipasi Sekolah Penduduk 5 Tahun ke Atas	17
Angka Partisipasi Sekolah	20
Angka Partisipasi Kasar	23
Angka Partisipasi Murni	26
Net Intake Rate	28
Angka Putus Lanjut	28
Rasio Angka Partisipasi Murni	29
<b>BAB 4 CAPAIAN PENDIDIKAN</b>	
Angka Melek Huruf	32
Rata-rata Lama Sekolah	34
Pendidikan yang Ditamatkan	36

---

Indikator Pendidikan Lainnya	38
Peningkatan Mutu Pendidikan	39
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
Kesimpulan	41
Saran	42
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	43
<b>TABEL-TABEL LAMPIRAN</b>	44

<http://papua.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>	
Tabel 1	Persentase <i>Response Rate</i> Blok Sensus dan Rumah Tangga Susenas 2016 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	4
Tabel 2	Indikator Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Jenis Kelamin, 2016	14
Tabel 3	Partisipasi Sekolah Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2016	18
Tabel 4	Partisipasi Sekolah Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2016	19
Tabel 5	Partisipasi Sekolah Penduduk 5-24 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur, 2016	19
Tabel 6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2016	22
Tabel 7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin, 2016	19
Tabel 8	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2016	24
Tabel 9	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin, 2016	25
Tabel 10	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2016	27
Tabel 11	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin, 2016	25
Tabel 12	Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2016	32
Tabel 13	Persentase Penduduk 15-24 Tahun yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2016	33
Tabel 14	Persentase Penduduk 15-24 Tahun yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2016	31
Tabel 15	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2016	35
Tabel 4.3	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2016	34
Tabel 16	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Daerah Tempat Tinggal, 2016	36

Tabel 17	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Daerah Tempat Tinggal, 2016	37
Tabel 18	Angka Mengulang dan Angka <i>Drop Out</i> Menurut Jenjang Pendidikan, 2016	38
Tabel 19	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Provinsi Papua, 2015	39

<http://papua.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>	
Gambar 1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD 0-6 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2016	13
Gambar 2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD 0-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin, 2016	14
Gambar 3	Angka Kesiapan Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin, 2016	16
Gambar 4	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur, 2010-2016	21
Gambar 5	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, 2016	29

## DAFTAR TABEL LAMPIRAN

		<i>Halaman</i>
Tabel 1	Persentase Penduduk 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Prasekolah, 2016	44
Tabel 2a	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Prasekolah, 2016	45
Tabel 2b	Persentase Penduduk Laki-laki Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Prasekolah, 2016	46
Tabel 2c	Persentase Penduduk Perempuan Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Prasekolah, 2016	47
Tabel 3a	Persentase Penduduk Laki-laki Usia 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Prasekolah, 2016	48
Tabel 3b	Persentase Penduduk Perempuan Usia 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Prasekolah, 2016	49
Tabel 3c	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Usia 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Prasekolah, 2016	50
Tabel 4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2016	51
Tabel 5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, 2016	52
Tabel 6	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2016	53
Tabel 7	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2016	54
Tabel 8	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 – 24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2016	55
Tabel 9	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2016	56
Tabel 10	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2016	57
Tabel 11	Persentase Penduduk Laki-laki 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2016	58

Tabel 12	Persentase Penduduk Perempuan 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2016	59
Tabel 13	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2016	60

<http://papua.bps.go.id>

---

# Bab 1 : Pendahuluan

---

## Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan arah pembangunan manusia, karena melalui pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemampuan dalam mengatasi hambatan, dan memperluas berbagai pilihan dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya secara berkelanjutan. Menyadari hal tersebut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana yang tercantum pada Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 artikel 26. Bahkan di Indonesia, pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan bahkan sudah tercantum dalam Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 31 (Amandemen IV), ayat pertama yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Implikasi dari pasal tersebut adalah pemerintah bertugas untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang dituangkan ke dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sistem tersebut diatur melalui jalur formal, bukan formal, dan informal yang sifatnya saling melengkapi dan memperkaya. Jalur formal terdiri atas jenjang pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat), pendidikan menengah (SM/ sederajat), dan pendidikan tinggi (Diploma/ Sarjana/ Magister/ Spesialis/ Doktor). Pendidikan bukan formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Sementara itu, pendidikan informal diperoleh dari keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Untuk mendukung terlaksananya sistem tersebut, pemerintah juga menyusun strategi di mana arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional telah disusun dengan memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional seperti Konvensi Deklarasi tentang Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*), Konvensi Hak-hak Anak (*The Rights of Child*), Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*), dan *World Summit on Sustainable Development*. Dalam menyusun berbagai kebijakan tersebut, diperlukan data dan informasi yang akurat dan terkini sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat disajikan berbagai indikator pendidikan yang mampu menjadi alat perencanaan maupun evaluasi program pemerintah dalam bidang pendidikan.

---

## Tujuan Penulisan

Maksud dan tujuan utama dari penulisan publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di Provinsi Papua tahun 2016. Publikasi ini menyajikan data dan informasi di bidang pendidikan melalui berbagai indikator pendidikan yang sangat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program pemerintah daerah.

## Ruang Lingkup

Indikator pendidikan yang disajikan dalam publikasi ini merupakan pendidikan yang ditempuh melalui jalur formal, sebagaimana yang dicakup oleh Susenas. Dengan demikian, ada tiga jenjang pendidikan yang disajikan, yaitu:

1. Pendidikan dasar yaitu SD/ sederajat umur 7 – 12 tahun;
2. Pendidikan menengah SMP/ sederajat usia 13 – 15 tahun.
3. Pendidikan menengah atas yaitu SMA/ sederajat usia 16 – 18 tahun.
4. Pendidikan tinggi, yaitu Diploma/ Sarjana umur 19 – 24 tahun.

Selain itu, sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan oleh pemerintah, publikasi ini juga menyajikan capaian pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk anak usia 3 – 5 tahun.

## Sistematika Penulisan

Publikasi ini disajikan ke dalam lima bab, bab pertama berisi latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan publikasi untuk memberikan gambaran awal mengenai isi publikasi ini. Bab kedua mengenai metodologi serta konsep dan definisi, bab ketiga merupakan penyajian berbagai indikator partisipasi sekolah. Selanjutnya pada bab empat disajikan gambaran capaian pembangunan pendidikan tahun 2016. Publikasi ini ditutup dengan kesimpulan dan saran pada bab kelima. Data-data pendidikan menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua disajikan pada tabel-tabel lampiran.

---

## Bab 2 : Metodologi

---

### *Sumber Data*

Sumber data utama dari penulisan publikasi ini adalah data Kor Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016. Dari beberapa kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan BPS, Susenas merupakan survei yang memiliki beberapa kelebihan. Pertama, bila dibandingkan dengan survei lain, Susenas memiliki cakupan data sosial paling luas, salah satu di antaranya adalah data pendidikan. Kedua, Susenas dapat memenuhi sebagian kesenjangan kebutuhan data yang paling mendesak. Hal ini dimungkinkan karena mulai tahun 2015 pencacahan Susenas dilaksanakan dua kali setahun yaitu bulan Maret dan September, di mana pencacahan bulan Maret dengan jumlah sampel besar untuk menghasilkan data yang representatif sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan pencacahan bulan September dengan ukuran sampel kecil untuk menghasilkan data yang representatif hanya untuk estimasi provinsi dan nasional.

Selain itu, untuk mempertajam analisis mengenai kondisi pendidikan di Provinsi Papua, publikasi ini juga dilengkapi dengan data-data terkait yang bersumber dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Provinsi Papua, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk data realisasi APBD di sektor pendidikan, serta data-data pendukung lainnya.

### *Metode Pengumpulan Data*

Pengumpulan data Susenas dilakukan dengan mendatangi langsung rumah tangga terpilih dan melakukan wawancara secara langsung antara petugas pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang ditujukan kepada individu, maka yang menjadi responden untuk mendapatkan keterangan ini adalah individu yang bersangkutan. Sementara untuk keterangan mengenai rumah tangga, dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik rumah tangga yang ditanyakan.

### *Cakupan Sampel*

Target blok sensus Susenas Tahun 2016 sebesar 1.104 sampel yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Papua. Sebaran sampel yang sebagian besar di wilayah sulit dan susah dijangkau menyebabkan tidak semua sampel blok sensus tersebut berhasil dikunjungi, sehingga dari seluruh kabupaten/kota hanya 1.086 blok sensus (98,37 persen) yang berhasil dikunjungi oleh petugas lapangan. Selanjutnya dalam proses kompilasi data di BPS RI, terdapat data rumah tangga (ruta) yang tidak

diikutsertakan karena dianggap sebagai pencilan maupun karena data yang masuk sudah melampaui batas waktu pengolahan. Dengan demikian *raw data* final Susenas 2016 Provinsi Papua berjumlah 10.374 ruta atau dengan *response rate* sebesar 93,97 persen.

**Tabel 1**

Persentase *Response Rate* Blok Sensus dan Rumah Tangga Susenas 2016 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Kabupaten/Kota	Target BS	BS Data Final		Target Ruta	Ruta Data Final	%
		Jumlah	%			
[01] Merauke	44	42	95.45	440	398	90.45
[02] Jayawijaya	48	48	100.00	480	471	98.13
[03] Jayapura	40	40	100.00	400	364	91.00
[04] Nabire	40	40	100.00	400	360	90.00
[08] Kep. Yapen	40	40	100.00	400	378	94.50
[09] Biak Numfor	44	44	100.00	440	410	93.18
[10] Paniai	44	44	100.00	440	414	94.09
[11] Puncak Jaya	40	40	100.00	400	397	99.25
[12] Mimika	48	47	97.92	480	431	89.79
[13] Boven Digoel	36	36	100.00	360	326	90.56
[14] Mappi	40	40	100.00	400	391	97.75
[15] Asmat	40	40	100.00	400	398	99.50
[16] Yahukimo	48	48	100.00	480	475	98.96
[17] Pegunungan Bintang	40	40	100.00	400	399	99.75
[18] Tolikara	44	44	100.00	440	428	97.27
[19] Sarmi	24	24	100.00	240	231	96.25
[20] Keerom	36	36	100.00	360	348	96.67
[26] Waropen	20	20	100.00	200	179	89.50
[27] Supiori	20	20	100.00	200	179	89.50
[28] Mamberamo Raya	20	18	90.00	200	176	88.00
[29] Nduga	40	34	85.00	400	336	84.00
[30] Lanny Jaya	48	48	100.00	480	475	98.96
[31] Mamberamo Tengah	28	26	92.86	280	255	91.07
[32] Yalimo	36	31	86.11	360	306	85.00
[33] Puncak	40	40	100.00	400	400	100.00
[34] Dogiyai	40	40	100.00	400	395	98.75
[35] Intan Jaya	28	28	100.00	280	264	94.29
[36] Deiyai	36	36	100.00	360	344	95.56
[71] Jayapura	52	52	100.00	520	446	85.77
<b>Jumlah</b>	<b>1 104</b>	<b>1 086</b>	<b>98.37</b>	<b>11 040</b>	<b>10 374</b>	<b>93.97</b>

Sumber: Susenas 2016

Syarat utama untuk mendapatkan statistik yang valid adalah ketepatan dalam menggambarkan atau mewakili (merepresentasikan) informasi. Artinya untuk menghasilkan statistik yang valid dibutuhkan kecukupan sampel yang dapat mewakili populasinya. Besar kecilnya *response rate* sampel rumah tangga terkait dengan estimasi statistik yang dihasilkan. Jika jumlah sampel yang dikumpulkan tidak mencukupi maka estimasi statistik yang dihasilkan akan bias dan menjauhi nilai parameternya. *Response rate* sampel rumah tangga antar kabupaten/kota berbeda-beda dan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu:

- Kabupaten dengan *response rate* baik (lebih dari 90 persen) sebanyak 22 kabupaten/kota.
- Kabupaten dengan *response rate* cukup (75 persen s/d 90 persen) sebanyak 7 kabupaten.
- Kabupaten dengan *response rate* rendah (kurang dari 75 persen) tidak ada.

Publikasi ini menyajikan berbagai indikator pendidikan yang dapat menggambarkan kondisi capaian pembangunan pendidikan di Provinsi Papua. Keakuratan berbagai indikator tersebut bergantung pada kecukupan sampel yang dibutuhkan masing-masing indikator untuk dapat mewakili populasinya. Semakin kecil peluang terjadinya suatu kasus atau indikator (*rare cases*) maka semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan.

Manar Abdel Rahman mengemukakan bahwa indikator dalam bentuk proporsi atau persentase yang baik dihasilkan dari sejumlah sampel (tanpa pembobot) dengan denominator sebesar 50<sup>1</sup>. Sebuah indikator dengan denominator berada di antara 25 – 50 masih dapat digunakan namun perlu kehati-hatian dalam menginterpretasikan. Sementara itu, apabila nilai denominatornya berada di bawah 25 maka indikator tersebut lebih baik tidak digunakan. Susenas merupakan survei berbasis rumah tangga, oleh sebab itu penyajian data dalam publikasi ini mengacu pada kaidah di atas. Dalam tabel lampiran disertakan jumlah sampel dari setiap indikator, nilai indikator yang diberi tanda [...] berarti perlu kehati-hatian dalam menginterpretasikan, sedangkan indikator yang diberi tanda n.a. artinya tidak dapat disajikan terkait kecukupan sampel.

## Metode Analisis

Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah data pendidikan yang bersifat umum dan berkaitan langsung dengan perkembangan pendidikan masyarakat. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang tujuannya adalah memberikan gambaran tentang keadaan pendidikan di Provinsi Papua pada tahun 2016.

---

<sup>1</sup> Bahan ajar dalam *Workshop Analisis Data dan Penulisan Laporan Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) Tanah Papua 2012*

## Konsep dan Definisi

Untuk lebih memahami dan menyamakan pengertian dalam membaca publikasi ini, berikut disajikan konsep dan definisi yang digunakan. Konsep dan definisi yang disajikan dibatasi hanya pada indikator yang disajikan, seperti angka partisipasi sekolah, jenjang pendidikan tertinggi yang pernah atau sedang diduduki, ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki, dan persentase penduduk yang buta huruf. Berikut konsep dan definisi yang terkait dengan indikator yang disajikan dalam publikasi ini:

### Partisipasi Sekolah

Seseorang dikatakan **bersekolah** apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal, baik yang di bawah pengawasan Kemendiknas maupun instansi lain. Partisipasi sekolah yaitu menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini. Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu:

**Tidak/belum pernah bersekolah** adalah tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar;

**Masih bersekolah** adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal;

#### Catatan:

1. Bagi mahasiswa yang sedang cuti dinyatakan **masih** bersekolah.
2. Bagi yang sudah diterima namun belum mulai sekolah dinyatakan **masih** bersekolah.

**Tidak bersekolah lagi** adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif.

#### Catatan:

1. Mereka yang sedang mengikuti program paket A setara dan pernah mengikuti pendidikan di SD dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.
2. Mereka yang sedang mengikuti program paket B setara dan pernah mengikuti pendidikan di SMP dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.
3. Mereka yang sedang mengikuti program paket C setara dan pernah mengikuti pendidikan di SMA dimasukkan sebagai tidak bersekolah lagi.
4. Program Diploma I hanya program diploma pada pendidikan formal yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi.

## Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan formal terdiri dari:

1. Jenjang pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) umum/kejuruan (termasuk SMP terbuka, SMEP, ST, SKKP) Madrasah Tsanawiyah (MTs).
2. Jenjang pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (a.l. SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh departemen selain Depdiknas).
3. Jenjang pendidikan tinggi meliputi:
  - a. *Program gelar* adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik, yaitu keahlian yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan/penerapan konsep, dan metode operasional dalam suatu bidang ilmu, teknologi, atau seni yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi, mencakup pendidikan sarjana muda, pendidikan sarjana/strata I (S1), pendidikan pasca sarjana/strata II (S2), dan pendidikan doktor/strata III (S3).
  - b. *Program non-gelar* adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, seperti keahlian yang menekankan pada keterampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan. Program ini mencakup pendidikan diploma I (D.I), pendidikan diploma II (D.II), pendidikan diploma III (D.III), pendidikan diploma IV (D.IV), pendidikan spesialis 1 (Sp 1), pendidikan spesialis 2 (Sp 2).

### Jenjang dan Jenis Pendidikan Tertinggi yang Pernah/Sedang Diduduki:

**Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah.

**Sekolah Dasar(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)** adalah Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong);

**Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ sederajat/kejuruan** adalah Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat {MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Keterampilan Kejuruan, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu (SGB), Pendidikan Guru Agama (PGA), Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama};

**Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat** adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA));

**Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)** adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen;

**Program D.I/II** adalah program D.I/D.II pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma I/II pada pendidikan formal;

**Program D.III** adalah program D.III atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda;

Contoh:

- a. Akademi Seni Musik Indonesia
- b. Akademi Seni Tari Indonesia
- c. Akademi Bahasa Asing
- d. Akademi Pimpinan Perusahaan
- e. Akademi Kimia Analisis
- f. Akademi Meteorologi dan Geofisika

**Program D.IV/S1** adalah program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi;

**S2/S3** adalah program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

**Catatan:**

1. Bagi mereka yang bersekolah di dua sekolah (atau lebih) dicatat pada salah satu saja.

Contoh:

- Anak yang bersekolah di SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah akan dicatat di SD atau Madrasah Ibtidaiyah, tergantung jawaban responden.
2. Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2 dan spesialis 2 disetarakan dengan S3.

## Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki

**Tidak punya ijazah SD dan sederajat** adalah mereka yang tidak memiliki ijazah SD/MI/sederajat. Mereka pernah bersekolah di Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, paket A1-A100, Paket A Setara) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga mereka yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat;

**SD** adalah tamat Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, atau paket A1-A100);

**Madrasah Ibtidaiyah (MI)** adalah tamat Madrasah Ibtidaiyah yang sederajat dengan Sekolah Dasar;

**SMP Umum/Kejuruan** adalah tamat Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, atau yang sederajat, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah Kepandaian Putri, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Sekolah Teknik, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Keterampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi, dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama;

**Madrasah Tsanawiyah (MTs)** adalah tamat Madrasah Tsanawiyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama;

**SMA/sederajat** adalah tamat Sekolah Menengah Atas, atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas);

**Madrasah Aliyah (MA)** adalah tamat Madrasah Aliyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas;

**SMK** adalah tamat sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, HBS 5 tahun;

**Diploma I/II** adalah tamat program DI/DII pada suatu lembaga pendidikan formal yang khusus diberikan untuk program diploma;

**Diploma III/Sarjana Muda**, adalah yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu perguruan tinggi;

**Diploma IV/S1** adalah tamat program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi;

**S2/S3** adalah tamat program pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis 1 dan 2 pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi.

### **Kemampuan Membaca dan Menulis**

**Huruf latin**, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin, misalnya kalimat "*Anda harus berlaku adil*";

**Huruf lainnya**, bila responden hanya dapat membaca dan menulis selain huruf latin, misalnya huruf arab, cina dan sebagainya;

**Huruf latin dan huruf lainnya**, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya;

**Tidak dapat**, bila responden tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya.

**Dapat membaca dan menulis** artinya dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

#### **Catatan:**

1. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf *braille* digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin.
2. Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.
3. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

**Angka Melek Huruf**, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

**Angka Partisipasi Sekolah**, proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok usia tertentu (7-12, 13-15, 16-18 dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

**Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**, menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh, dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan.

**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**, adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang bersekolah dibandingkan dengan penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu.

**Angka Partisipasi Murni (APM)**, adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang bersekolah tepat waktu.

## Bab 3 : Partisipasi Sekolah

---

Indonesia merupakan salah satu dari 164 negara yang ikut menandatangani konvensi internasional *Education for All (EFA)* di Dakar Senegal pada tahun 2000, yang bertujuan untuk membantu para pengambil kebijakan di seluruh negara dalam memenuhi kebutuhan penduduk terhadap pendidikan. Konvensi tersebut memuat kesepakatan berupa enam tujuan yang harus dicapai pada tahun 2015, yaitu:

1. Memperluas dan mengembangkan pendidikan anak usia dini secara menyeluruh, khususnya untuk anak yang kurang beruntung;
2. Memastikan bahwa semua anak, terutama anak perempuan, anak yang dalam situasi sulit, dan anak yang termasuk dalam kelompok minoritas, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar dengan baik tanpa pungutan biaya;
3. Menjamin akses pembelajaran dan pendidikan kecakapan hidup yang merata untuk semua orang;
4. Meningkatkan angka melek huruf orang dewasa khususnya perempuan, sebesar 50 persen, dan pemerataan akses pendidikan dasar dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan dasar dan menengah, dengan berfokus pada akses penuh dan merata serta pendidikan dasar yang berkualitas baik untuk anak perempuan; dan
6. Mengembangkan dan menjamin seluruh aspek mutu pendidikan sehingga dihasilkan *outcome* pendidikan yang dapat diukur dan diakui, terutama dalam hal baca tulis, angka, dan kemampuan dasar lain.

Sebelum konvensi tersebut, komitmen Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pendidikan penduduk terlihat melalui berbagai program pendidikan seperti Program Wajib Belajar Sembilan Tahun (WAJAR) pada tahun 1994 dan Pendidikan Untuk Semua (PUS) pada tahun 2000. Salah satu tujuan strategis program pendidikan tahun 2015-2019 sebagaimana yang tercantum dalam tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2015-2019 adalah peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan pendidikan berkebutuhan khusus. Terwujudnya tujuan tersebut ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut.

1. APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70 persen.
2. AMH penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,10 persen.
3. APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55 persen.
4. APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20 persen.
5. APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77 persen.

6. APM SMP/SMPLB/ sekurang-kurangnya 73,72 persen.
7. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 persen.
8. APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50 persen.
9. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun.

Sejalan dengan itu, Provinsi Papua dalam proses percepatan pembangunan melalui Program Gerakan Membangun Masyarakat Harapan Seluruh Rakyat Papua (Gerbang Mas Hasrat Papua) memprioritaskan aspek pendidikan. Untuk itu diperlukan informasi pencapaian pendidikan di Provinsi Papua melalui berbagai indikator pendidikan yang disajikan dalam bab ini, di antaranya adalah pendidikan anak usia dini, partisipasi sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

### *Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*

Secara umum tujuan program pendidikan anak usia dini (pra sekolah) adalah agar semua anak usia dini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh kembang secara optimal guna meningkatkan kecerdasan yang dimilikinya. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

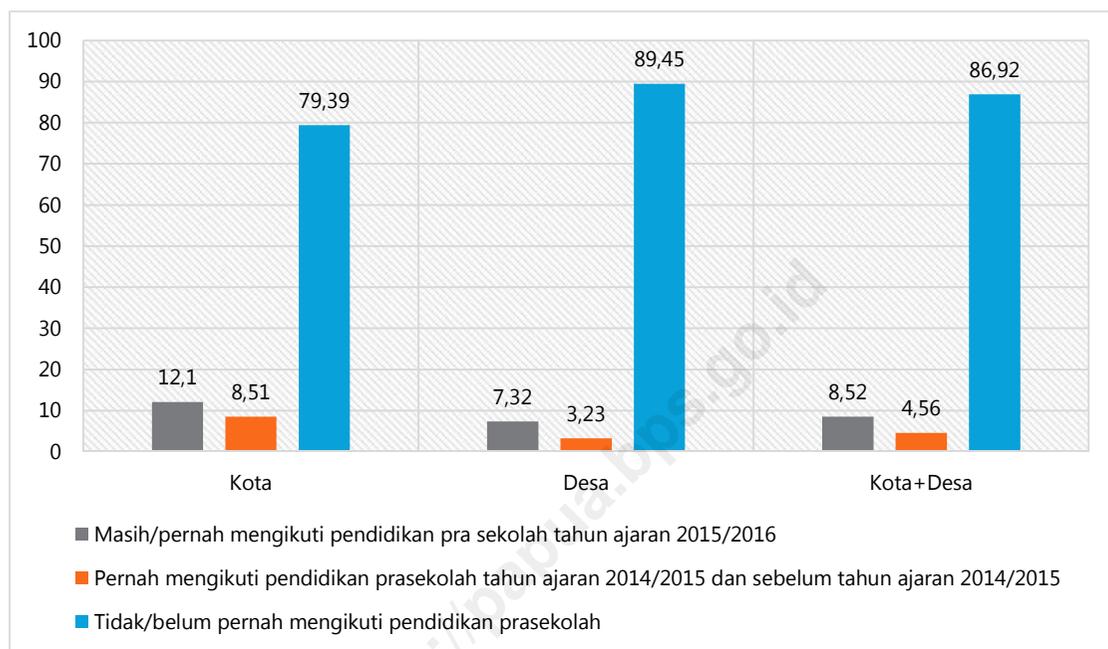
Munculnya program ini tidak lepas dari kesadaran bahwa usia dini (anak yang baru dilahirkan sampai usia enam tahun) merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sujiono (2009) bahwa usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, atau disebut sebagai usia emas (Rapi, tanpa tahun). Dryden dan Vos (1999) juga menyatakan bahwa 50 persen kemampuan belajar anak ditentukan dalam empat tahun pertamanya dan 30 persen sebelum mencapai usia delapan tahun. Pendidikan pra sekolah juga merupakan modal pendidikan dalam rangka persiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

Pendidikan pra sekolah (selanjutnya disebut PAUD) diselenggarakan melalui jalur formal, bukan formal, maupun informal. PAUD formal seperti Taman Kanak-kanak (TK), Raudhotul Atfal (RA), dan bentuk lain yang sederajat; PAUD bukan formal seperti Kelompok Bermain (KB/*Play Group*), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat; sedangkan PAUD informal diperoleh melalui orang tua, keluarga, atau lingkungan. Melalui PAUD, diberikan pendidikan, perawatan, dan pengembangan anak secara terpadu, sehingga diharapkan masa tersebut dapat secara optimal dikembangkan.

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian partisipasi penduduk dalam pendidikan anak usia dini, di antaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD yang

didefinisikan sebagai jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan usia dini tanpa memandang usia, yang dinyatakan sebagai persentase dari populasi dalam kelompok usia yang relevan. Dalam publikasi ini APS PAUD dinyatakan sebagai persentase penduduk usia 0-6 tahun yang masih mengikuti atau pernah mengikuti pendidikan pra sekolah pada tahun ajaran bersangkutan.

**Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD 0-6 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2016**



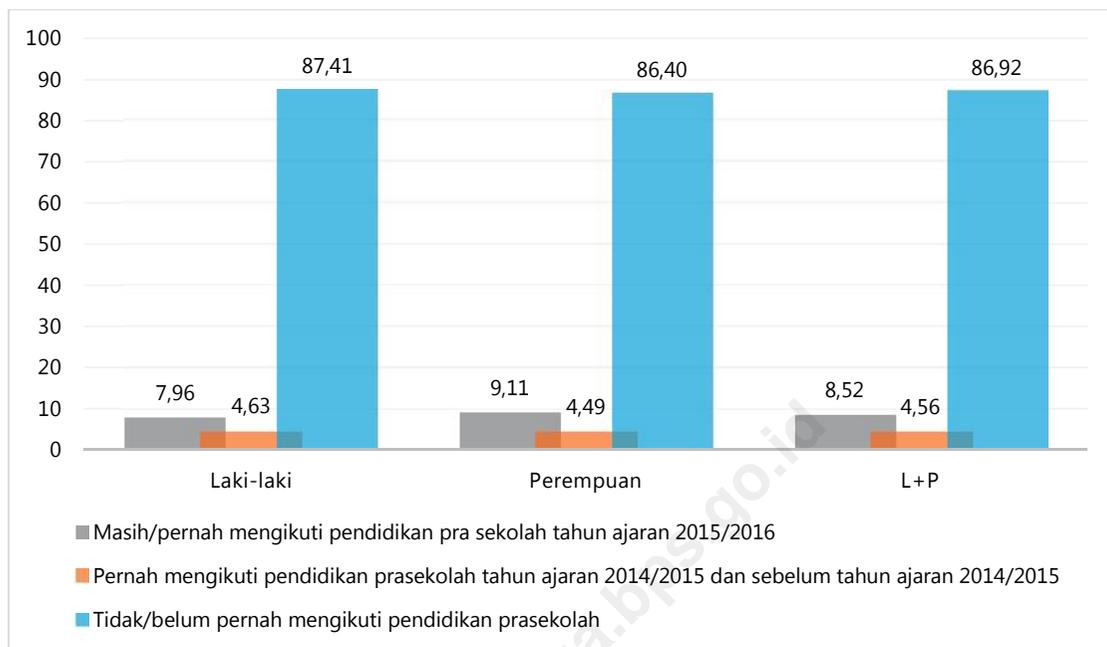
Sumber: Susenas 2016

Hasil Susenas menunjukkan bahwa APS PAUD di Papua pada tahun 2016 masih cukup rendah yaitu sebesar 8,52 persen. Ini berarti bahwa dari 100 anak usia 0-6 tahun di Papua, hanya terdapat 8-9 anak usia 0-6 tahun yang sedang/pernah mengikuti pendidikan pra sekolah pada tahun ajaran 2015/2016. Sementara itu, terdapat 4,56 persen anak usia 0-6 tahun yang pernah mengikuti pendidikan pra sekolah pada tahun ajaran 2014/2015 dan pada tahun ajaran sebelumnya. Selanjutnya apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, APS PAUD di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar di atas, secara umum APS PAUD di daerah perkotaan sebesar 12,10 persen sedangkan di daerah perdesaan sebesar 7,32 persen.

Menurut jenis kelamin, APS PAUD perempuan usia 0-6 tahun lebih tinggi daripada APS PAUD pada anak laki-laki pada kelompok umur yang sama. Data Susenas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, APS PAUD perempuan sebesar 9,11 persen sedangkan APS PAUD laki-laki sebesar 7,96 persen. Sementara itu, pada tahun yang sama, sebesar 4,63 persen anak laki-laki pernah mengikuti pendidikan pra sekolah pada tahun ajaran 2014/2015 dan sebelum tahun ajaran 2014/2015, yaitu sedikit lebih tinggi

daripada partisipasi pra sekolah anak perempuan pada tahun ajaran yang sama yaitu sebesar 4,49 persen.

**Gambar 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD 0-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin, 2016**



Sumber: Susenas 2016

Indikator lain yang umum digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan pra sekolah (TK, BA/RA, PAUD) adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD 3-4 tahun, dan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD. Selain itu, indikator tersebut dapat menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa pada pendidikan pra sekolah dan kapasitas negara (daerah) dalam mempersiapkan anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Tabel 2 menunjukkan capaian beberapa indikator pendidikan pra sekolah di Papua hasil Susenas 2016.

**Tabel 2**  
**Indikator Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Jenis Kelamin, 2016**

Jenis Kelamin	Kelompok Umur		
	APS 3-4	APK	APM
(1)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	4.30	16.59	9.40
Perempuan	7.31	20.67	12.28
<b>Laki-laki+Perempuan</b>	<b>5.73</b>	<b>18.50</b>	<b>10.75</b>

Sumber: Susenas, 2016

Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD 3-4 tahun digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi anak usia 3-4 tahun dalam pendidikan prasekolah (TK, BA/RA, PAUD). Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah anak usia 3-4 tahun yang terdaftar dalam pendidikan usia dini (TK, BA/RA, PAUD) yang dinyatakan sebagai persentase dari populasi anak usia 3-4 tahun. Pada tahun 2016 berdasarkan hasil Susenas, sebesar 5,73 persen anak usia 3-4 tahun terdaftar dan aktif sebagai peserta pendidikan usia dini baik di TK, BA/RA, maupun PAUD atau Kelompok Bermain/ *Play Group*. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, APS PAUD perempuan lebih tinggi daripada APS PAUD laki-laki yaitu masing-masing sebesar 7,31 persen dan 4,30 persen.

Sementara itu, APK PAUD didefinisikan sebagai persentase anak yang terdaftar dalam pendidikan prasekolah/PAUD formal yaitu TK, BA/RA, dan PAUD, tanpa memandang usia, dari penduduk kelompok umur yang bersesuaian. Dalam publikasi ini, kelompok umur bersesuaian yang dimaksud adalah kelompok anak usia 3-5 tahun. Dari tabel di atas terlihat bahwa APK PAUD di Papua pada tahun 2016 sebesar 18,50 persen di mana APK PAUD anak perempuan sebesar 20,67 persen, jauh lebih tinggi daripada APK PAUD anak laki-laki sebesar 16,59 persen.

Selanjutnya, APM PAUD merupakan persentase anak kelompok umur tertentu yang terdaftar dalam PAUD formal terhadap populasi kelompok umur yang bersesuaian. Ada dua kelompok umur yang biasanya digunakan yaitu kelompok umur 3-5 tahun sesuai dengan yang ditetapkan UNESCO dan kelompok umur 3-6 tahun sesuai dengan Renstra Kemendikbud. APM pada masing-masing kelompok umur menunjukkan seberapa besar anak usia dini yang mengikuti pendidikan pra sekolah sesuai dengan umurnya. Semakin tinggi nilai APM berarti semakin banyak anak usia dini yang mengikuti pendidikan pra sekolah di suatu daerah sesuai dengan usianya. Pada publikasi ini, kelompok umur yang digunakan merujuk pada ketentuan UNESCO yaitu 3-5 tahun. Berdasarkan hasil Susenas, APM PAUD di Papua pada tahun 2016 sebesar 10,75 persen yang berarti, dari 100 anak usia 3-5 tahun di Papua, terdapat 10 hingga 11 anak usia 3-5 tahun yang sedang/pernah mengikuti pendidikan pra sekolah (TK, BA/RA, maupun KB/*Play Group*) pada tahun ajaran 2015/2016. Menurut jenis kelamin, APM PAUD anak perempuan lebih tinggi (12,28 persen) dibandingkan APM PAUD anak laki-laki (9,40 persen).

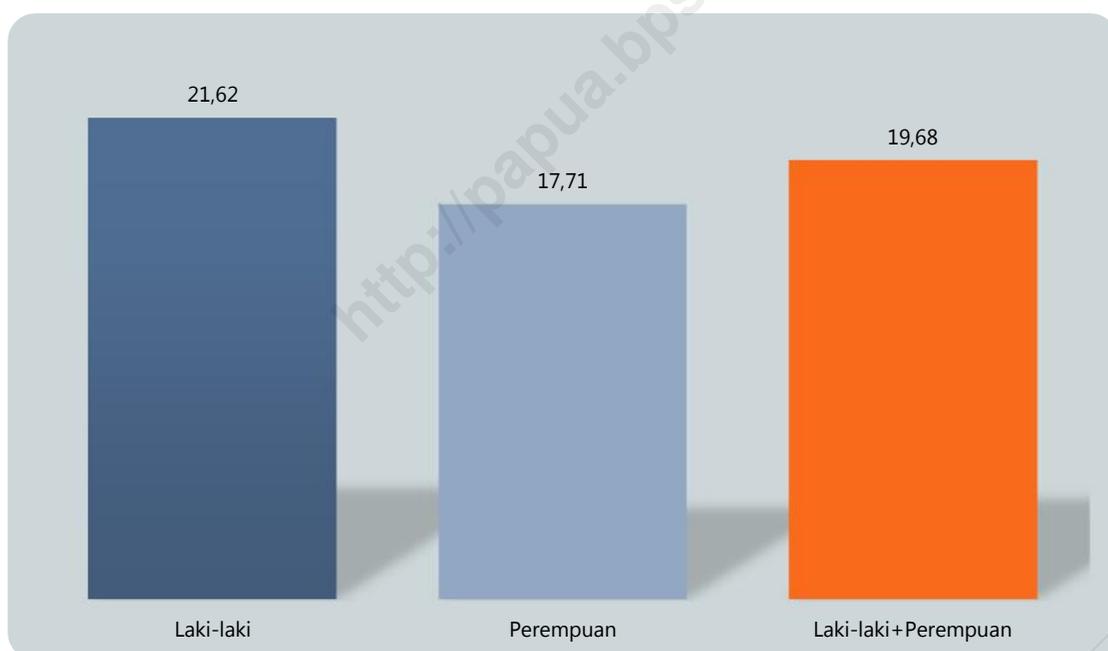
Untuk diketahui, angka yang dihasilkan oleh indikator APK cenderung lebih tinggi daripada APM, mengingat pada pengukuran APK, tidak mempertimbangkan kesesuaian usia anak yang mengikuti PAUD pada kelompok umur penduduk yang bersesuaian. Dengan kata lain, APK pada kelompok umur 3-5 tahun dan 3-6 tahun bergantung pada banyaknya penduduk masing-masing kelompok umur, dengan demikian kelompok umur 3-6 tahun yang cakupannya lebih besar selalu memiliki APK lebih kecil dibandingkan APK kelompok umur 3-5 tahun. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Kemendikbud yaitu sekurang-kurangnya 78,70 persen, maka angka tersebut masih sangat jauh dari target yang ingin dicapai pemerintah.

## Angka Kesiapan Sekolah

Salah satu arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun adalah memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar<sup>1</sup>. Upaya yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkannya, salah satunya melalui peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun.

Kesiapan bersekolah merupakan strategi yang telah terbukti dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial sebuah masyarakat. Berbagai studi menunjukkan manfaat dan pengembalian investasi dari kesiapan bersekolah, terkait dengan penurunan biaya pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan manusia, dan manfaat bagi masyarakat. Program-program pendidikan dan perkembangan anak usia dini yang efektif dapat menurunkan biaya pendidikan melalui peningkatan efisiensi internal pendidikan dasar; sedikit anak mengulang kelas (Unicef, 2012).

**Gambar 3. Angka Kesiapan Sekolah (AKS) Menurut Jenis Kelamin, 2016**



Sumber: Susenas, 2016

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar adalah Angka Kesiapan Sekolah (AKS). Indikator ini juga dapat menunjukkan kapasitas suatu wilayah dalam mempersiapkan anak sebelum memasuki pendidikan dasar. AKS didefinisikan

<sup>1</sup> Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019

sebagai jumlah anak yang terdaftar pada SD/ sederajat kelas 1 yang tahun ajaran sebelumnya mengikuti pendidikan prasekolah, yang dinyatakan sebagai persentase dari populasi anak yang bersekolah di kelas 1 SD/ sederajat. Nilai AKS berkisar antara 0 hingga 100 persen. Semakin tinggi nilai AKS maka semakin banyak anak usia kelas 1 SD yang telah disiapkan sebelumnya melalui pendidikan pra sekolah.

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, angka kesiapan sekolah anak dalam memasuki pendidikan dasar di Papua sebesar 19,68 persen atau dengan kata lain, di antara 100 anak yang bersekolah kelas 1 SD pada tahun ajaran 2016/2017, terdapat 19-20 anak yang telah mengikuti pendidikan pra sekolah formal pada tahun ajaran sebelumnya. Selanjutnya, ada perbedaan kesiapan sekolah di antara anak laki-laki dan anak perempuan. Data Susenas menunjukkan bahwa persentase anak laki-laki kelas 1 SD yang pernah mengikuti pendidikan pra sekolah sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Pada tahun 2016, AKS laki-laki sebesar 21,62 persen sedangkan AKS perempuan sebesar 17,71 persen. Secara umum AKS di Papua masih cukup rendah, hal ini disebabkan rendahnya partisipasi pra sekolah di provinsi ini.

### *Partisipasi Sekolah Penduduk 5 Tahun ke Atas*

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan, bahkan Solow menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan terakselerasi dan senantiasa meningkat akibat adanya *human capital* yang tinggi (Pasay, Handayani, Indrayanti (2016)). Modal manusia yang tinggi dapat diperoleh dari investasi pada manusia seperti pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan nutrisi. Mankiw (2012) menyatakan bahwa pendidikan merepresentasikan pengeluaran untuk pengembangan sumber daya guna meningkatkan produktivitas di masa mendatang. Pasay, Handayani, Indrayanti (2016) menyatakan bahwa investasi terhadap pendidikan masih memberikan imbal hasil privat yang semakin tinggi sejalan dengan peningkatan jenjangnya. Dengan kata lain, masih menguntungkan apabila seseorang memilih untuk berpendidikan tinggi.

Pemerintah telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat agar dapat menikmati pendidikan dasar. Berbagai program seperti pendidikan gratis pada tingkat dasar di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin, dan berbagai program lainnya seharusnya mampu mendorong partisipasi penduduk untuk bersekolah. Bahkan pemerintah pusat memfokuskan pembangunan pendidikan di daerah tertinggal seperti Papua melalui berbagai program khusus seperti Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia (MBMI), Afirmasi Pendidikan Tinggi bagi Putra-Putri Asli Papua, dan berbagai program lainnya guna mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya di Indonesia.

**Tabel 3**  
**Partisipasi Sekolah Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2016**

Partisipasi Sekolah	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah bersekolah	4.48	33.39	25.83
Masih bersekolah	31.63	23.89	25.91
Tidak bersekolah lagi	63.89	25.91	48.25
Total	100.00	100.00	100.00

*Sumber:* Susenas 2016

Tabel 3.4 di atas menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia lima tahun ke atas menurut tipe daerah, yang sekaligus dapat menggambarkan keaktifan penduduk dalam pendidikan. Dalam publikasi ini partisipasi sekolah penduduk dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah; masih bersekolah; dan tidak bersekolah lagi. Masih sekolah ialah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal yang berada di bawah pengawasan Kemdikbud, Kementerian Agama (Kemenag), instansi negeri lain maupun instansi swasta.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, sebesar 25,91 persen penduduk lima tahun ke atas di Papua masih bersekolah, sebesar 48,25 persen tidak bersekolah lagi, dan masih ada sekitar 26 persen penduduk yang tidak/belum pernah sekolah. Menurut daerah tempat tinggal, partisipasi sekolah penduduk lima tahun ke atas di daerah perkotaan lebih tinggi daripada penduduk di daerah perdesaan. Hal ini terlihat dari besarnya persentase mereka yang masih bersekolah di daerah perkotaan yaitu sebesar 31,63 persen dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan, yaitu sebesar 23,89 persen. Ketimpangan akses terhadap pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan cukup jelas terlihat dari tabel tersebut. Persentase penduduk lima tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah di perdesaan mencapai hampir 34 persen, sementara di daerah perkotaan hanya sekitar lima persen. Ketimpangan akses tersebut dapat disebabkan oleh fasilitas pendidikan di daerah perkotaan yang lebih lengkap dan relatif lebih mudah dijangkau, atau dapat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan rumah tangga di perdesaan yang relatif lebih rendah daripada rumah tangga di daerah perkotaan.

**Tabel 4**  
**Partisipasi Sekolah Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2016**

Partisipasi Sekolah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah bersekolah	22.78	29.25	25.83
Masih bersekolah	26.53	25.22	25.91
Tidak bersekolah lagi	50.69	45.53	48.25
Total	100.00	100.00	100.00

Sumber: Susenas 2016

Menurut jenis kelamin, partisipasi sekolah penduduk laki-laki lima tahun ke atas di Papua sedikit lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya persentase laki-laki yang masih bersekolah yaitu sebesar 26,53 persen dibandingkan persentase perempuan yang masih bersekolah yaitu sebesar 25,22 persen. Sejalan dengan itu, persentase perempuan yang pada umur tersebut tidak/belum pernah sekolah terlihat lebih tinggi daripada laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 29,25 persen dan 22,78 persen.

**Tabel 5**  
**Partisipasi Sekolah Penduduk 5-24 Tahun Menurut Kelompok Umur, 2016**

Kelompok Umur	Partisipasi Sekolah			Total
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5 – 6	84.98	14.84	0.18	100.00
7 – 12	18.74	81.11	0.15	100.00
13 – 15	17.71	78.86	3.44	100.00
16 – 18	18.25	62.07	19.68	100.00
19 – 24	18.14	23.75	58.10	100.00

Sumber: Susenas 2016

Sementara itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur, penduduk dikelompokkan menurut usia ideal sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan, yaitu: prasekolah (5-6 tahun); SD/ sederajat (7-12 tahun); SMP/ sederajat (13-15 tahun); SMA/ sederajat (16-18 tahun); dan pendidikan tinggi (19-24 tahun).

Tabel 5 menunjukkan bahwa semakin tinggi kelompok umur, semakin rendah partisipasi sekolah penduduk, atau dengan kata lain partisipasi sekolah penduduk semakin menurun seiring dengan semakin tingginya umur seseorang. Dari tabel tersebut terlihat bahwa partisipasi sekolah penduduk 7-12

tahun lebih tinggi daripada partisipasi sekolah pada kelompok umur lainnya, di mana sebesar 81,11 persen penduduk usia 7-12 tahun sedang bersekolah; sebesar 18,74 persen tidak/belum pernah bersekolah; dan sisanya sebesar 0,15 persen tidak bersekolah lagi pada usia tersebut yang dapat disebabkan salah satunya putus sekolah. Sementara itu, partisipasi sekolah penduduk 5-6 tahun merupakan yang terendah dibanding kelompok umur lainnya yaitu tidak lebih dari 15 persen, hal ini dapat disebabkan kelompok umur tersebut masih cukup dini untuk bersekolah pada jenjang pendidikan formal.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa semakin tinggi umur seseorang, partisipasi sekolah cenderung semakin rendah. Pada kelompok umur 13-15 tahun, persentase mereka yang masih bersekolah sebesar 78,86 persen, menjadi sebesar 62,07 persen pada kelompok umur 16-18 tahun. Pada kelompok umur selanjutnya yaitu 19-24 tahun, partisipasi sekolah penduduk hanya sebesar 23,75 persen. Dengan kata lain, banyak penduduk di Papua yang berhenti sekolah mulai umur 16 tahun. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya persentase penduduk yang tidak bersekolah lagi pada kelompok umur 16 tahun ke atas, yang dapat disebabkan oleh putus sekolah, tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, masuk ke dunia kerja, dan berbagai alasan lainnya.

Di sisi lain, masih cukup banyak penduduk usia 7-24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah, di mana persentasenya hampir mencapai 20 persen. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena kelompok usia tersebut adalah usia ideal untuk bersekolah dan pendidikan adalah modal dasar seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Menurut kabupaten/kota, persentase partisipasi sekolah penduduk 7-24 tahun paling tinggi adalah di Kabupaten Biak Numfor yaitu sebesar 78,77 persen dan Kabupaten Merauke sebesar 77,16 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang masih sekolah paling rendah di sebagian besar kabupaten di wilayah pegunungan, seperti Kabupaten Puncak, Deiyai, dan Intan Jaya. Tabel selengkapnya dapat dilihat pada tabel lampiran. Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi sekolah penduduk di Papua masih rendah, khususnya pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Pemerintah daerah harus dapat mendorong partisipasi sekolah penduduk apabila ingin memenuhi program wajib belajar 12 tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019.

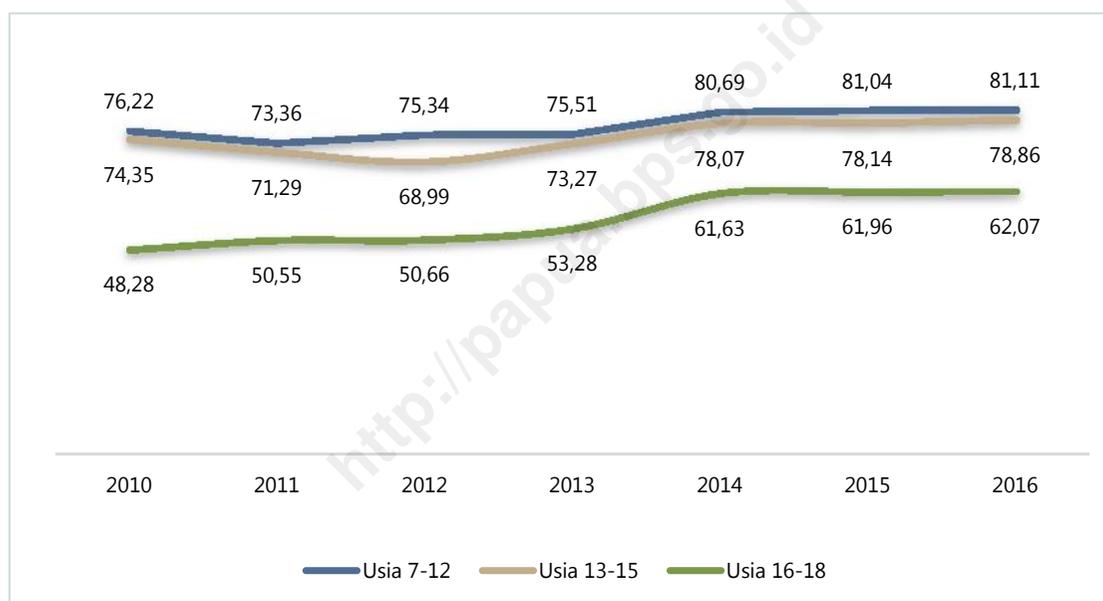
### *Angka Partisipasi Sekolah*

Salah satu kesepakatan dalam konvensi EFA yang turut ditandatangani Indonesia adalah menuntaskan gerakan wajib belajar pendidikan dasar untuk semua anak, supaya tercapai mulai tahun 2005 dan selambat-lambatnya tahun 2015 (Unesco, 2000). Dukungan pemerintah Indonesia terhadap konvensi tersebut dituangkan melalui PP No.47 Tahun 2008 mengenai program wajib belajar. Meskipun demikian, yang perlu diketahui adalah wajib belajar di Indonesia berbeda dengan negara-negara maju

yang menggunakan wajib belajar secara wajib (*compulsary*). Wajib belajar yang dimaksud adalah membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk pendidikan dasar 9 tahun (Simanullang, 2014).

Indikator pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung oleh setiap jenjang sekolah. Peningkatan jumlah murid tidak dapat diartikan meningkatnya partisipasi sekolah. Indikator dasar yang digunakan untuk mengetahui akses penduduk khususnya penduduk usia sekolah terhadap pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu, yaitu kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Semakin tinggi APS berarti semakin tinggi partisipasi sekolah dari penduduk umur tertentu. APS sebesar 100 berarti seluruh penduduk pada kelompok umur tertentu bersekolah, sesuai dengan target yang ingin dicapai pemerintah.

**Gambar 4. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur, 2010-2016**



Sumber: Susenas 2016

Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk Papua pada setiap kelompok umur mengalami peningkatan dari tahun-tahun. Pada tahun 2016, APS 7-12 tahun mencapai 81,11 persen; APS 13-15 tahun sebesar 78,86 persen; dan APS 16-18 tahun sebesar 62,07 persen. peningkatan capaian APS tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya yang paling tinggi adalah pada kelompok umur 13-15 tahun yaitu sekitar 0,72 persen. Lutz, Goujon, & Wills (2008) mengemukakan bahwa APS mampu menunjukkan arah pembangunan pendidikan (Simanullang, 2014). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan APS selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa arah pembangunan pendidikan di Provinsi Papua sudah berada pada jalur yang benar, dan bukan tidak mungkin APS di provinsi ini dapat mencapai 100 persen dalam beberapa tahun ke depan.

**Tabel 6**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2016**

Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 – 12 tahun	98.21	76.38	81.11
13 – 15 tahun	97.93	73.15	78.86
16 – 18 tahun	85.44	53.95	62.07
19 – 24 tahun	39.33	15.47	23.75

*Sumber:* Susenas 2016

Tabel 6 menunjukkan APS penduduk umur 7-24 tahun menurut daerah tempat tinggal. Data Susenas menunjukkan bahwa APS bervariasi antar kelompok umur pada jenjang pendidikan yang bersesuaian. Semakin tinggi kelompok umur maka semakin rendah capaian indikator tersebut. APS paling tinggi adalah pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu sebesar 81,11 persen, selanjutnya pada kelompok umur 13-15 tahun yaitu sebesar 78,86 persen; pada kelompok umur 16-18 tahun capaian APS sebesar 62,07 persen; sementara pada kelompok umur 19-24 tahun capaian APS hanya sebesar 23,75 persen. Ini mengindikasikan semakin tinggi umur seseorang semakin kecil akses yang dimiliki terhadap pendidikan. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkannya, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu tidak tersedianya fasilitas pendidikan tinggi di wilayah terdekatnya atau desakan ekonomi yang menuntut masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi aktif.

APS di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Hal tersebut terlihat pada semua kelompok umur, di mana semakin tinggi kelompok umur penduduk, selisih APS daerah perkotaan dan perdesaan semakin besar. Selisih paling besar terlihat pada kelompok umur 16-18 tahun yaitu kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Akses penduduk di daerah perkotaan terhadap fasilitas pendidikan menengah atas yang relatif lebih banyak dan mudah dijangkau dibandingkan daerah perdesaan dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi sekolah penduduk kelompok umur 16-18 tahun untuk bersekolah. Selain itu, faktor ekonomi seperti tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi di daerah perdesaan mendorong seseorang pada kelompok umur tersebut untuk berhenti sekolah dan memilih untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi aktif. APS pada kelompok umur 19-24 tahun di daerah perkotaan dan perdesaan masih cukup rendah, meskipun di daerah perkotaan masih lebih tinggi.

**Tabel 7**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin, 2016**

Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 – 12 tahun	81.56	80.61	81.11
13 – 15 tahun	79.02	78.66	78.86
16 – 18 tahun	63.49	60.45	62.07
19 – 24 tahun	25.71	21.27	23.75

*Sumber:* Susenas 2016

Ada perbedaan capaian APS antara penduduk laki-laki maupun perempuan pada semua kelompok umur penduduk. Secara umum, partisipasi sekolah penduduk laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, yang ditunjukkan oleh tingginya APS laki-laki dibandingkan perempuan pada semua kelompok umur. Meskipun demikian, kesenjangan tersebut tidak terlalu nyata karena selisih capaian APS antara penduduk laki-laki dan perempuan cukup kecil. Ini mengindikasikan bahwa anak laki-laki dan perempuan di Papua sudah cukup mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal bersekolah.

APS kabupaten/kota bervariasi pada setiap jenjang pendidikan, di mana APS pada kelompok umur 7-12 pada umumnya lebih tinggi daripada kelompok umur 13-15 dan 16-18 tahun. APS di kabupaten/kota yang berada di wilayah pesisir terlihat lebih tinggi daripada kabupaten yang berada di wilayah pegunungan. Tabel selengkapnya dapat dilihat pada tabel lampiran.

### *Angka Partisipasi Kasar*

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Indikator ini mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya, sebagai contoh, APK SD menunjukkan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Dengan demikian, nilai APK bisa lebih dari 100 persen, karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Secara umum, APK dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan program pembangunan

pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan<sup>2</sup>.

**Tabel 8**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2016**

Angka Partisipasi Kasar (APK)	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	106.13	91.59	94.74
SMP	100.66	63.52	72.07
SMA	120.92	48.05	66.85
PT	33.80	8.28	17.14

*Sumber:* Susenas 2016

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) bervariasi menurut jenjang pendidikan. Sama halnya dengan APS pada bahasan sebelumnya, capaian APK tertinggi adalah pada jenjang pendidikan SD yaitu sebesar 94,74 persen; selanjutnya jenjang pendidikan SMP sebesar 72,07 persen; APK SMA sebesar 66,85 persen; dan pada jenjang perguruan tinggi yaitu sebesar 17,14 persen. Hal ini mengindikasikan masih ada penduduk pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah di atas/bawah jenjang pendidikan yang bersesuaian dengan kelompok umur tersebut.

Menurut daerah tempat tinggal, capaian APK di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan pada setiap jenjang pendidikan. Tabel di atas menunjukkan, di daerah perkotaan, APK pada jenjang SD, SMP, dan SMA mencapai lebih dari 100, ini berarti terdapat anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan bersangkutan, berada di luar range kelompok umur yang bersesuaian. Sebagai contoh, APK SD mencapai 106,13 persen. Hal ini dapat disebabkan karena orang tua yang cenderung mendaftarkan anak yang belum mencapai tujuh tahun ke SD meskipun tidak melalui PAUD atau terlambat mengenyam pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Selain itu, tabel di atas juga menunjukkan bahwa selisih APK perkotaan dan perdesaan meningkat seiring dengan kenaikan jenjang berikutnya. Perbedaan yang paling besar terlihat pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa fasilitas atau sarana pendidikan menengah ke atas di Papua masih terpusat di daerah perkotaan, sehingga sulitnya kondisi wilayah di beberapa kabupaten semakin menghambat kesempatan dan akses penduduk untuk bersekolah.

<sup>2</sup> BPS, Statistik Pendidikan 2014

**Tabel 9**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin, 2016**

Angka Partisipasi Kasar (APK)	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	97.03	92.24	94.74
SMP	68.63	76.09	72.07
SMA	75.00	57.49	66.85
PT	16.36	18.12	17.14

*Sumber:* Susenas 2016

Menurut jenis kelamin, APK laki-laki lebih tinggi daripada perempuan hampir pada semua jenjang pendidikan meskipun selisihnya tidak begitu besar. Perbedaan paling besar terlihat pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Tabel di atas menunjukkan bahwa APK laki-laki pada jenjang pendidikan SD dan SMA lebih tinggi daripada APK perempuan. Data Susenas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, APK SD laki-laki sebesar 97,03 persen sedangkan APK perempuan pada jenjang pendidikan yang sama sebesar 92,24 persen. Demikian halnya pada capaian APK SMA di mana APK laki-laki mencapai 75 persen sedangkan APK perempuan hanya sebesar 57,49 persen.

Sebaliknya, pada jenjang pendidikan SMP dan Perguruan Tinggi (PT), capaian APK perempuan sedikit lebih tinggi daripada capaian APK laki-laki. Data Susenas menunjukkan, capaian APK SMP perempuan mencapai 76,09 persen lebih tinggi daripada APK laki-laki yaitu sebesar 68,63 persen. Sementara pada jenjang pendidikan tinggi, APK perempuan sebesar 18,12 persen, sedikit lebih tinggi daripada capaian APK laki-laki sebesar 16,36 persen. Ini mengindikasikan bahwa laki-laki memiliki akses yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan menengah, namun perempuan cenderung lebih bertahan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh kecenderungan di mana laki-laki lebih memilih untuk langsung bekerja ketika menamatkan pendidikan menengah atas daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hal yang menarik terlihat ketika APK dilihat sebarannya menurut kabupaten/kota. Hasil Susenas 2016 menunjukkan, sebagian besar kabupaten/kota di Papua memiliki APK (SD, SMP, SMA) di atas 100 persen. Terdapat 14 kabupaten dengan APK SD lebih dari 100 persen; empat kabupaten dengan APK SMP lebih dari 100 persen; dan tujuh kabupaten dengan APK SMA lebih dari 100 persen. Ini menunjukkan bahwa di provinsi ini, banyak didapati umur penduduk yang bersekolah tidak sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya ditempuh. Pada tahun 2016, capaian APK SD dan APK SMP paling rendah yaitu Kabupaten Puncak sedangkan capaian APK SMA paling rendah di Kabupaten Nduga. Tabel selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

Sesuai dengan tujuan strategis Kemendikbud pada tahun 2015-2019 yaitu peningkatan partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah, sasaran yang ingin dicapai adalah APK SD/ sederajat sekurang-kurangnya 100,55 persen; APK SMP/ sederajat sekurang-kurangnya 83,77 persen; dan APK SMA/ sederajat sekurang-kurangnya 85,71 persen. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015, maka masih diperlukan kerja pemerintah daerah untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan selama lima tahun mendatang.

### Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut. Indikator ini berguna untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dengan demikian, APM akan mencapai 100 persen apabila seluruh anak usia sekolah bersekolah tepat waktu.

**Tabel 10**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2016**

Angka Partisipasi Murni (APM)	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	92.70	74.77	78.66
SMP	78.74	46.94	54.26
SMA	71.78	33.35	43.27
PT	20.05	4.70	10.03

Sumber: Susenas 2016

Tabel 10 menunjukkan APM menurut jenjang pendidikan SD hingga PT berdasarkan hasil Susenas. Tabel tersebut menunjukkan bahwa APM pada setiap jenjang pendidikan di Papua belum mencapai 100 persen, ini berarti bahwa belum ada penduduk yang bersekolah berumur tepat sesuai dengan jenjang pendidikan bersangkutan. APM SD tahun 2016 mencapai 78,66 persen; APM SMP mencapai 54,26 persen; APM SMA sebesar 43,27 persen; sedangkan capaian APM PT hanya sebesar 10,03 persen. Apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai pemerintah sesuai dengan Renstra Kemendikbud 2015-2019, capaian APM di Papua pada tahun 2016 masih belum sesuai target.

Menurut daerah tempat tinggal, secara umum APM di daerah perkotaan jauh lebih tinggi daripada capaian APM di daerah perdesaan di setiap jenjang pendidikan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar selisih capaian APM antara daerah perkotaan

dan perdesaan. Sama seperti pada indikator pendidikan yang telah dibahas sebelumnya, perbedaan terbesar terlihat pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan ini patut menjadi perhatian karena tujuan dari Pendidikan Untuk Semua adalah menjamin seluruh penduduk menerima pendidikan tanpa membedakan daerah tempat tinggal, jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Banyak faktor yang diduga mempengaruhi ketimpangan pendidikan antara perkotaan dan perdesaan, di antaranya ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan tinggi, ketersediaan guru atau tenaga pendidik, kemiskinan, dsb.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, nilai APM akan selalu lebih kecil dari nilai APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Data Susenas menunjukkan APK SD pada tahun 2016 mencapai 94,74 persen, sedangkan APM pada tahun yang sama sebesar 78,66 persen. Dengan kata lain, sebesar 78,66 persen anak sekolah yang berumur 7-12 tahun tepat sedang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat, selisihnya sebesar 16,08 persen adalah penduduk yang berusia di luar kelompok umur tersebut namun sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD/ sederajat. Demikian halnya dengan jenjang pendidikan SMP dan SMA, capaian APM selalu berada di bawah APK.

**Tabel 11**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin, 2016**

Angka Partisipasi Murni (APM)	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	78.93	78.36	78.66
SMP	50.45	58.71	54.26
SMA	45.32	40.91	43.27
PT	8.94	11.41	10.03

Sumber: Susenas 2016

Sementara itu, tidak terlihat perbedaan yang besar antara capaian APM penduduk laki-laki dan perempuan pada masing-masing jenjang pendidikan, meskipun APM penduduk laki-laki pada hampir semua jenjang pendidikan lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Apabila dibandingkan dengan target pemerintah yaitu APM SD sekurang-kurangnya 85,20 persen; APM SMP sekurang-kurangnya 73,72 persen; dan APM SMA sekurang-kurangnya 67,50 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Provinsi Papua saat ini masih di bawah target yang diharapkan. Meskipun demikian, apabila dilihat capaian APM pada masing-masing kabupaten, ada 16 kabupaten/kota yang telah memenuhi target capaian APM SD yang ditetapkan; ada lima kabupaten/kota yang memenuhi target capaian APM SMP; dan tiga kabupaten/kota yang telah memenuhi target capaian APM SMA. Melihat capaian tersebut,

---

bukan tidak mungkin dalam lima tahun ke depan pemerintah provinsi maupun daerah dengan kebijakan dan program pendidikannya dapat meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan menengah.

### *Net Intake Rate*

*Net Intake Ret* (NIR) pada kelas pertama suatu jenjang pendidikan tertentu menunjukkan persentase siswa yang baru masuk ke kelas pertama dari suatu jenjang pendidikan yang berumur sesuai dengan umur masuk jenjang pendidikan tersebut. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur secara tepat tingkat akses ke suatu jenjang pendidikan oleh penduduk yang berumur sesuai dengan umur masuk jenjang pendidikan tersebut.

Pada tahun 2016, *net intake rate* pada kelas pertama SD sebesar 48,04, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 47,89 persen. Ini berarti bahwa sebesar 48,04 persen siswa yang baru pertama kali masuk di kelas pertama pada jenjang pendidikan SD berumur tepat tujuh tahun. Data Susenas juga menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, *net intake rate* pada kelas pertama pada jenjang pendidikan yang bersesuaian, semakin kecil. NIR pada kelas pertama SMP dan SMA masing-masing sebesar 27,70 persen dan 15,36 persen, masing-masing mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Dengan kata lain, semakin tinggi jenjang pendidikan, tingkat kesesuaian umur siswa yang baru pertama kali masuk di kelas pertama pada jenjang pendidikan tersebut, semakin rendah. NIR sebesar 100 persen diperlukan untuk mencapai tujuan dari sistem pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah masih perlu mencari penyebab dan solusi untuk meningkatkan *net intake rate* khususnya pada jenjang pendidikan SMP dan SMA.

### *Angka Putus Lanjut*

Indikator angka putus lanjut diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai putusnya keberlanjutan pendidikan dari suatu jenjang ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, indikator ini juga bermanfaat untuk menganalisis dan memproyeksi arus siswa dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain. Angka putus lanjut didefinisikan sebagai proporsi dari suatu kohor yang terdaftar dari kelas terakhir pada suatu jenjang pendidikan pada tahun ajaran sebelumnya namun tidak dapat naik ke kelas pertama pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi di tahun berikutnya. Angka putus lanjut yang tinggi menunjukkan rendahnya angka keberlanjutan dari suatu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pada tahun 2016, angka putus lanjut pada saat kelas 6 SD di Papua sebesar 11,89 persen mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yaitu sebesar 12,64 persen; angka putus lanjut pada saat kelas 3 SMP sebesar 21,15 persen, naik sekitar 0,86 persen dari 20,29 persen; dan angka putus lanjut pada saat kelas 3 SMA sebesar 29,69 persen, turun dari 51,06 persen pada tahun 2015. Data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat keberlanjutan siswa ke

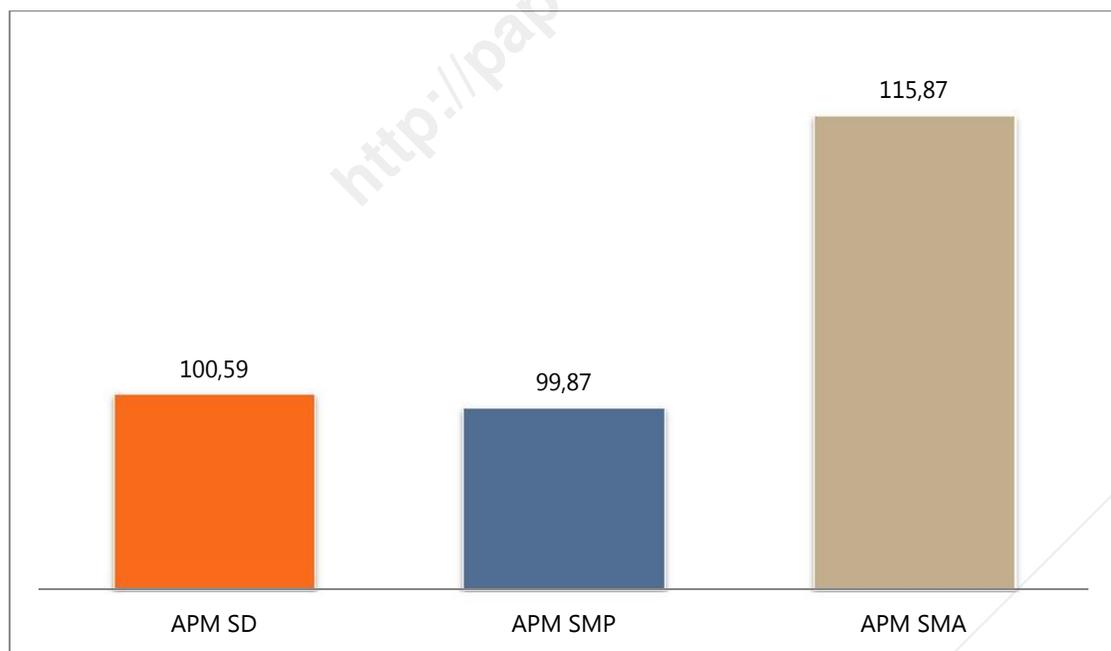
jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, data Susenas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 angka putus lanjut pada saat kelas 3 SMA sebesar 29,69 persen. Ini berarti, dari 100 siswa yang terdaftar pada kelas 3 SMA di tahun 2015, terdapat 29-30 siswa yang tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi pada tahun 2016.

Meskipun angka putus lanjut SD dan SMP lebih kecil, tidak berarti bahwa kondisi pendidikan di jenjang pendidikan SD dan SMP lebih baik. Sebaliknya kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang tidak melanjutkan pendidikan dasar dan menengahnya, sehingga hanya berpendidikan rendah. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkannya, antara lain faktor ekonomi, fasilitas atau sarana prasarana yang terbatas, merasa pendidikan sudah cukup, dan lain sebagainya.

### Rasio Angka Partisipasi Murni

Salah satu tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam aspek pendidikan, kesetaraan gender mendukung adanya pemenuhan hak memperoleh pendidikan dasar, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Terwujudnya kesetaraan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan ekonomi.

**Gambar 5. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, 2016**



Sumber: Susenas 2016

---

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat disparitas gender dalam aspek pendidikan adalah rasio APM. Rasio APM merupakan persentase APM perempuan terhadap APM laki-laki. Nilai rasio lebih dari 100 menunjukkan APM perempuan lebih besar daripada APM laki-laki. Dengan kata lain, kesetaraan gender sudah terwujud. Data Susenas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 nilai rasio APM SD dan APM SMA mencapai lebih dari 100 persen yaitu masing-masing sebesar 100,59 persen dan 115,87 persen. sementara itu, rasio APM SMP pada tahun yang sama sebesar 99,87 persen. Ini berarti penduduk perempuan yang bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan SD dan SMA, lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Sementara pada jenjang pendidikan SMP, lebih banyak penduduk laki-laki yang bersekolah tepat waktu dibandingkan perempuan.

Apabila dibandingkan dengan target rasio APM yang ingin dicapai pemerintah yaitu rasio APM SD dan SMP masing-masing sebesar 98 persen; dan rasio APM SMA sebesar 95 persen, maka dapat dikatakan bahwa target telah berhasil dicapai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Papua, kesetaraan gender dalam aspek pendidikan telah terwujud.

## Bab 4 : Capaian Pendidikan

---

Tiga tujuan inti pembangunan menurut Todaro (2006) adalah peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan; 2) peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan lapangan pekerjaan, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan; serta 3) perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu dan bangsa secara keseluruhan. Modal manusia merupakan salah satu faktor penentu tercapainya tujuan pembangunan, sehingga investasi modal manusia yang tepat dapat meningkatkan produktivitas manusia dan mendorong peningkatan kualitas kehidupan manusia dan negara.

Peningkatan kualitas hidup manusia melalui pendidikan sepenuhnya disadari oleh pemerintah pusat yang terlihat dari agenda prioritas Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar. Sejalan dengan itu, pemerintah Provinsi Papua juga mengukung program Gerbang Mas Hasrat Papua yang bertujuan untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, perbaikan mutu generasi emas dan berdaya ekonomi, serta pemenuhan infrastruktur Papua.

Arah pembangunan pendidikan di Papua telah berada pada jalur yang benar, yang terlihat dari peningkatan partisipasi sekolah penduduk, peningkatan APK, APS, dan APM, serta peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendidikan, bahkan anggaran negara secara nasional mencapai 21 persen pada tahun 2015. Indikator-indikator tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan akses yang seluas-luasnya bagi penduduk Papua agar dapat menikmati pendidikan. Meskipun demikian, berbagai indikator tersebut belum cukup menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, diperlukan indikator lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Lutz, Goujon, & Wils (2008) menyatakan bahwa dalam studi perkembangan pendidikan, penting untuk membedakan antara arah (*flow*) pembangunan dan persediaan (*stock*) pembangunan di bidang pendidikan tersebut.

Dalam pelaksanaannya pembangunan di bidang pendidikan menghadapi berbagai tantangan, di antaranya tingginya disparitas antar kabupaten/kota yang disebabkan variasi dan sulitnya wilayah geografis, pemerataan distribusi guru, kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta tantangan lainnya. Meskipun demikian, diharapkan kondisi pendidikan akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian pembangunan pendidikan yang disajikan dalam bab ini di antaranya adalah angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

## Angka Melek Huruf

Menurut Unesco, melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan, dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Kemampuan ini merupakan modal dasar seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, sehingga dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan.

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang melek huruf. Dengan demikian dapat dikaji seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan keterampilan, memudahkan komunikasi, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik, sehingga penduduk mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negara di berbagai bidang kehidupan.

**Tabel 12**  
**Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2016**

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	98.56	96.24	97.51
Perdesaan	67.98	53.07	60.87
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>	<b>76.72</b>	<b>64.60</b>	<b>71.02</b>

Sumber: Susenas, 2016

Data Susenas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, AMH penduduk 15 tahun ke atas di Papua sebesar 71,02 persen yang berarti dari setiap 100 penduduk 15 tahun ke atas terdapat 71-72 orang yang mampu membaca dan menulis. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu sebesar 70,83 persen, angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud, yaitu mencapai angka melek aksara penduduk usia dewasa 15 tahun ke atas, sekurang-kurangnya 96,10 persen.

Ada perbedaan capaian AMH antara penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan. Tabel 12 menunjukkan bahwa AMH daerah perkotaan jauh lebih tinggi daripada AMH perdesaan, yaitu masing-masing sebesar 97,51 persen dan 60,87 persen. Demikian halnya menurut jenis kelamin, di mana AMH laki-laki lebih tinggi (76,72 persen) dibandingkan perempuan (64,60 persen). Ketimpangan antar daerah tempat tinggal serta antar jenis kelamin perlu menjadi perhatian serius

pemerintah daerah karena kemampuan membaca dan menulis adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang jika ingin berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi pembangunan.

Selain menjadi salah satu target dalam Renstra Kemendikbud, melek aksara merupakan salah satu target MDGs yang secara nasional sudah tercapai pada tahun 2014, karena persentasenya sudah hampir mendekati 100 persen. Indikator yang digunakan untuk mengukur melek aksara penduduk dewasa adalah AMH 15-24 tahun. Indikator ini kemudian digunakan kembali pada target pembangunan berkelanjutan (SDGs), yaitu sebagai indikator pada target 4.4 dan target 4.6<sup>1</sup>. Meskipun secara nasional sudah tercapai, Provinsi Papua masih belum dapat memenuhi target tersebut pada tahun 2016, sehingga indikator ini masih relevan digunakan sebagai salah satu tolak ukur capaian pembangunan pendidikan.

**Tabel 13**  
**Persentase Penduduk 15-24 Tahun yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2016**

Kelompok Umur	Daerah Tempat Tinggal		Perkotaan + Perdesaan
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(6)
15 – 24	99.79	81.64	87.12
25 +	96.72	54.75	66.06
<b>Total</b>	<b>97.51</b>	<b>60.87</b>	<b>71.02</b>

Sumber: Susenas, 2016

Secara umum, capaian AMH 15-24 tahun di Papua sudah mencapai 87,12 persen sementara capaian AMH penduduk 25 tahun ke atas baru mencapai 66,06 persen. Sebagaimana pola yang terlihat sebelumnya, capaian indikator ini di daerah perkotaan jauh lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Pada tahun 2016, AMH 15-24 tahun di daerah perkotaan hampir mencapai 100 persen, sementara di perdesaan baru mencapai 81,64 persen. demikian halnya dengan capaian AMH penduduk 25 tahun ke atas, tabel tersebut menunjukkan capaian AMH 25 tahun ke atas di perkotaan mencapai 96,72 persen sedangkan di daerah perdesaan masih cukup rendah yaitu sebesar 54,75 persen.

<sup>1</sup> Target 4.4 SDGs yaitu pada tahun 2030 meningkatkan sebesar x persen jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan kedudukan, pekerjaan, dan kewirausahaan yang layak; Target 4.6 yaitu pada tahun 2030 memastikan bahwa semua pemuda dan setidaknya x persen dari orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan sudah melek huruf dan dapat berhitung.

**Tabel 14**  
**Persentase Penduduk 15-24 Tahun yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2016**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
15 – 24	90.11	83.47	87.12
25 +	72.39	59.11	66.06
<b>Total</b>	<b>76.72</b>	<b>64.60</b>	<b>71.02</b>

Sumber: Susenas, 2016

Menurut jenis kelamin, AMH penduduk 15-24 tahun laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, demikian juga pada capaian AMH penduduk 25 tahun ke atas. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 14, pada tahun 2016 AMH 15-24 tahun laki-laki mencapai 90,11 persen sedangkan AMH perempuan sebesar 83,47 persen. Pada kelompok umur 25 tahun ke atas, capaian AMH sedikit lebih rendah yaitu AMH laki-laki sebesar 76,72 persen sedangkan AMH perempuan hanya sebesar 59,11 persen. Dari gambaran di atas terlihat bahwa capaian AMH pada kelompok umur 25 tahun ke atas selalu lebih rendah daripada capaian AMH pada kelompok umur 15-24 tahun. Diduga, hal tersebut dipengaruhi oleh penduduk usia tua yang kecenderungannya tidak banyak yang memiliki kemampuan baca dan tulis. Ini dapat menjadi indikasi keberhasilan program pemerintah dalam pemberantasan buta aksara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah masih cukup berat jika ingin mencapai target yang ditetapkan pemerintah maupun target yang ingin dicapai secara global. Target utama untuk pemberantasan buta aksara adalah pada mereka yang tinggal di daerah perdesaan, di mana pada umumnya yaitu mereka yang tinggal di wilayah pegunungan, dan mereka yang berjenis kelamin perempuan.

### *Rata-Rata Lama Sekolah*

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menunjukkan hasil pencapaian pendidikan adalah rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas, karena mampu menunjukkan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan. Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD 6 tahun, tamat SMP 9 tahun, dst. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan (BPS, 2014).

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu sasaran strategis pembangunan pendidikan nasional. Pemerintah melalui Renstra Kemendikbud 2015-2019 menetapkan rata-rata lama sekolah penduduk pada tahun 2019 mencapai 8,8 persen, sementara itu target yang diharapkan tercapai pada tahun 2015 adalah 8,2 tahun. Tabel di bawah menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas berdasarkan hasil Susenas 2016.

**Tabel 15**  
**Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2016**

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	10.58	10.11	10.36
Perdesaan	5.67	4.14	4.94
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>	<b>7.08</b>	<b>5.73</b>	<b>6.45</b>

Sumber: Susenas, 2016

Data Susenas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Papua pada tahun 2016 adalah 6,45 tahun. Ini berarti rata-rata penduduk 15 tahun ke atas di Papua pendidikannya adalah tamat SD. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 6,27 tahun, capaian ini masih sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah secara nasional yaitu 8,2 tahun. Tabel di atas menunjukkan ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan, di mana rata-rata lama sekolah di perkotaan jauh lebih tinggi daripada perdesaan. Di perkotaan, rata-rata penduduk 15 tahun ke atas telah menamatkan pendidikan menengah pertama atau SMP/ sederajat, dengan rata-rata lama sekolah sebesar 10,36 tahun. Sementara itu, di daerah perdesaan rata-rata penduduk 15 tahun ke atas belum menamatkan pendidikan dasarnya, di mana rata-rata lama sekolah di daerah perdesaan hanya sebesar 4,94 tahun.

Menurut jenis kelamin, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Secara umum, capaian lama sekolah penduduk laki-laki sebesar 7,08 tahun atau sudah menamatkan pendidikan dasar, sedangkan capaian lama sekolah perempuan hanya sebesar 5,73 tahun, atau dengan kata lain, rata-rata perempuan usia 15 tahun ke atas di Papua belum menamatkan pendidikan dasar. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa kondisi pendidikan perempuan yang tinggal di daerah perdesaan sangat memprihatinkan. Rata-rata lama sekolah penduduk perempuan di perdesaan hanya sebesar 4,14 tahun, sangat timpang dengan penduduk perempuan di daerah perkotaan yang dapat menamatkan pendidikan menengah pertama.

Ketimpangan pendidikan yang dilihat dari indikator ini juga terlihat di antara kabupaten/kota yang ada di Papua. Rata-rata lama sekolah paling tinggi di Kota Jayapura yaitu sebesar 10,61 tahun atau

setara dengan pendidikan menengah, sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Deiyai yaitu hanya sekitar dua tahun atau tidak menamatkan pendidikan SD. Kondisi serupa terlihat hampir di sebagian besar kabupaten di wilayah pegunungan. Ini menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di wilayah pesisir jauh lebih baik daripada wilayah pegunungan.

### *Pendidikan yang Ditamatkan*

Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan adalah pendidikan yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas, yang ditunjukkan dengan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai bahan analisis pasar tenaga kerja. Pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk merupakan modal ketika masuk ke dalam kegiatan ekonomi, dan selanjutnya dapat menjadi modal yang besar untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan Provinsi Papua. Dalam dunia ketenagakerjaan, perusahaan cenderung menerima pekerja dengan melihat pendidikan yang ditamatkan. Bagi perusahaan, menerima pekerja dengan pendidikan tinggi lebih menguntungkan dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi produktivitasnya, meskipun produktivitas pada dasarnya juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengalaman, pelatihan, lingkungan, dsb. Dengan demikian, secara umum pendidikan yang tinggi masih sangat relevan dan penting untuk kesejahteraan penduduk.

**Tabel 16**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Daerah Tempat Tinggal, 2016**

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya ijazah	6.87	49.70	37.84
SD/ sederajat	26.44	26.39	26.40
SMP/ sederajat	11.74	6.95	8.28
SMA/ sederajat	38.72	14.13	20.94
D1/D2	0.69	0.12	0.28
D3	2.78	0.50	1.13
D4/S1/S2/S3	12.76	2.22	5.14
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Susenas, 2016

Situasi pendidikan di Papua pada tahun 2016 masih memprihatinkan. Hampir 40 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas tidak mempunyai ijazah dan sebesar 26,40 persen hanya memiliki ijazah SD/ sederajat. Dari tabel di atas terlihat bahwa hanya 20,94 persen saja penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat dan tidak sampai tujuh persen yang memiliki ijazah perguruan

tinggi (diploma dan sarjana). Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk 15 tahun ke atas di Papua berpendidikan rendah (SD ke bawah).

Ketimpangan jelas terlihat antara daerah perkotaan dan perdesaan, di mana secara umum kualitas pendidikan - yang ditunjukkan oleh ijazah yang dimiliki penduduk 15 tahun ke atas - di daerah perkotaan jauh lebih baik dibandingkan daerah perdesaan. Hampir 40 persen penduduk perkotaan memiliki ijazah SMA dan sebesar 16,23 persen memiliki ijazah perguruan tinggi. Kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan masyarakat di daerah perdesaan, di mana hampir 50 persen penduduk 15 tahun ke atas yang tinggal di daerah perdesaan tidak memiliki ijazah, sebesar 26,39 persen memiliki ijazah SD/ sederajat, dan hanya sekitar 17 persen lainnya memiliki ijazah SMA ke atas.

**Tabel 17**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin, 2016**

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya ijazah	32.28	44.09	37.84
SD/ sederajat	27.19	25.52	26.40
SMP/ sederajat	9.01	7.45	8.28
SMA/ sederajat	24.34	17.12	20.94
D1/D2	0.26	0.30	0.28
D3	0.92	1.37	1.13
D4/S1/S2/S3	6.01	4.15	5.14
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Susenas, 2016

Menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki memiliki pendidikan yang lebih baik daripada penduduk perempuan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel di atas, sebesar 31,53 persen penduduk laki-laki 15 tahun ke atas memiliki ijazah SMA ke atas, sementara penduduk perempuan hanya sebesar 22,94 persen saja yang memiliki ijazah tersebut. Bahkan data Susenas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, sebesar 44,09 persen perempuan di Papua tidak memiliki ijazah. Hal ini menjadi indikasi adanya perbedaan akses terhadap pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Papua.

Kondisi pendidikan di kabupaten/kota di Papua cukup memprihatinkan. Sebagian besar penduduk di kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan tidak atau belum pernah sekolah. Hanya di beberapa kabupaten/kota saja yang penduduknya hampir sebagian besar berpendidikan tinggi (SMA ke atas) seperti Kota Jayapura (57,14 persen), Mimika (51,63 persen), dan Biak Numfor (42,25 persen).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Papua belum dapat dinikmati secara merata oleh semua penduduk di wilayah Papua. Penduduk di daerah perkotaan mendapatkan akses yang lebih besar terhadap pembangunan di bidang pendidikan dibandingkan

penduduk di daerah perdesaan, penduduk laki-laki mendapatkan kesempatan yang lebih luas daripada perempuan, penduduk di wilayah pesisir cenderung mendapatkan akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan daripada di wilayah pegunungan. Paradigma pembangunan pendidikan adalah pendidikan harus diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, maupun geografis.

### Indikator Pendidikan Lainnya

Secara umum Provinsi Papua telah berhasil meningkatkan partisipasi sekolah penduduk dari tahun ke tahun, meskipun belum sesuai dengan target yang ditetapkan secara nasional. Selain upaya meningkatkan partisipasi sekolah penduduk, pemerintah Provinsi Papua juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa indikator pendidikan lainnya seperti angka mengulang menurut jenjang pendidikan serta angka *drop out* menurut kelas dan jenjang pendidikan dapat menunjukkan adanya masalah efisiensi internal dari sistem pendidikan sehingga dapat dicari penyebab dan solusi yang diperlukan untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Papua pada khususnya.

**Tabel 18**  
**Angka Mengulang dan Angka *Drop Out* Menurut Jenjang Pendidikan, 2016**

Jenjang Pendidikan	Angka Mengulang	Angka Drop Out
(1)	(2)	(3)
SD	1.03	0.03
SMP	1.60	3.04
SMA	1.54	1.80

Sumber: Susenas 2016

Angka mengulang menurut jenjang pendidikan merupakan proporsi dari suatu kohort yang terdaftar dalam suatu jenjang dan mengulang pada tahun berikutnya. Sementara itu, angka *drop out* merupakan proporsi dari suatu kohort yang pada tahun  $t-1$  terdaftar pada suatu jenjang pendidikan, namun pada tahun  $t$  tidak terdaftar lagi. Data Susenas menunjukkan bahwa, pada tahun 2016 angka mengulang pada jenjang SMP lebih tinggi daripada angka mengulang pada jenjang SD dan SMA. Angka mengulang SMP sebesar 1,60 persen berarti dari 100 siswa SMP yang terdaftar pada tahun 2015, terdapat 1-2 siswa yang mengulang pada tahun 2016.

Selanjutnya, tabel di atas juga menunjukkan sebesar 3,04 persen siswa SMP yang terdaftar pada tahun 2015 meninggalkan bangku SMP pada tahun 2016, tanpa menyelesaikannya terlebih dahulu (*drop out*). Meskipun persentasenya cukup kecil, secara ideal angka *drop out* seharusnya mencapai nol persen, sehingga perlu diketahui faktor yang menyebabkan siswa pada berbagai jenjang pendidikan *drop out* dari bangku sekolah. Angka *drop out* di jenjang pendidikan SMP yang terlihat lebih tinggi dibandingkan

jenjang pendidikan SD maupun SMA perlu menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SMP perlu mendapatkan penekanan pada berbagai program pendidikan.

### Peningkatan Mutu Pendidikan

Hasil pembangunan pendidikan yang dinikmati saat ini tidak terlepas dari berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, baik dari masa lalu maupun saat ini. Peningkatan fasilitas pendidikan baik sarana dan prasarana pendidikan serta besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program pendidikan merupakan beberapa faktor yang penting dalam mendorong capaian pendidikan di suatu daerah. Tabel di bawah menyajikan jumlah sarana pendidikan dan tenaga pengajar (guru) di Provinsi Papua pada tahun 2016.

Tabel 19  
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Provinsi Papua, 2016

Jenjang Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid/Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI	2 321	454 726	18 294	24.86
SMP/MTs	618	127 526	8 128	15.69
SMA/SMK/MA	363	93 458	7 407	12.62

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua  
Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua

Indikator sederhana yang biasa digunakan untuk melihat mutu pendidikan adalah rasio murid-guru yang merupakan perbandingan antara jumlah guru terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu. Standar ideal murid-guru adalah 1:40 untuk SD; 1:21 untuk SMP; dan 1:21 untuk SMA. Dari Tabel 19 terlihat bahwa pada tahun 2016 rasio murid-guru SD di Papua sebesar 24,86 artinya satu orang guru SD mendidik sekitar 24-25 murid SD; rasio murid-guru SMP sebesar 15,69 artinya satu orang guru SMP mendidik sekitar 15-16 murid SMP; dan rasio murid-guru SMA sebesar 12,62 berarti satu orang guru SMA mendidik sekitar 12-13 murid SMA. Apabila dibandingkan dengan kondisi ideal di atas, dapat dikatakan bahwa rasio murid-guru di Papua telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah, sehingga diharapkan penyampaian materi dalam kelas dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, apabila dilihat anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk sektor pendidikan, pada tahun 2016 pemerintah daerah mengalokasikan sekitar 3,66 persen dari total APBD. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan anggaran yang dialokasikan untuk sektor ini-tahun sebelumnya anggaran sektor pendidikan sebesar 2,82 persen. Pembiayaan sektor pendidikan merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi mutu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tentunya dapat dicapai apabila ditunjang dengan anggaran yang cukup. Melihat pencapaian

---

pendidikan di Papua hingga saat ini, dirasa perlu untuk meningkatkan alokasi untuk sektor pendidikan di tahun mendatang, sehingga pembangunan pendidikan dapat terdistribusi secara merata di seluruh kabupaten/kota di Papua.

<http://papua.bps.go.id>

---

## Bab 5 : Kesimpulan dan Saran

---

### Kesimpulan

Amanat konstitusi menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang mampu mendorong terwujudnya cita-cita negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, penting untuk membedakan antara arah (*flow*) pembangunan dan persediaan (*stock*) pembangunan.

Secara umum, Provinsi Papua telah berhasil meningkatkan akses pendidikan di semua jenjang, meskipun masih belum sesuai dengan tujuan strategis Kemendikbud RI. Berdasarkan hasil Susenas 2015, capaian beberapa indikator pendidikan seperti partisipasi pra sekolah penduduk 0-6 tahun; APK dan APM PAUD, partisipasi sekolah penduduk 5 tahun ke atas pada setiap jenjang pendidikan; maupun APS, APK, dan APM mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa arah pembangunan pendidikan di Papua sudah tepat, yaitu memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, dalam rangka mewujudkan manusia Papua yang lebih berkualitas. Selanjutnya, persediaan (*stock*) pembangunan pendidikan menunjukkan hasil yang dicapai terkait dengan modal manusia yang diperoleh melalui pendidikan. Indikator yang digunakan untuk mengukur *stock* dalam publikasi diantaranya adalah angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan. Data Susenas menunjukkan, pada tahun 2016 terjadi peningkatan hasil pembangunan pendidikan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan secara nasional.

Di tengah upaya untuk terus meningkatkan akses pendidikan seluas-luasnya, Papua juga diperhadapkan dengan tantangan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, khususnya distribusi pendidikan. Apabila dilihat distribusi pendidikan di Papua, ketimpangan pendidikan masih terlihat jelas, terutama antar kabupaten/kota dan tipe daerah (perkotaan dan perdesaan). Kabupaten yang berada di wilayah pesisir atau perkotaan capaian pendidikannya jauh lebih baik daripada kabupaten di wilayah pegunungan atau perdesaan. Ketimpangan pendidikan menurut jenis kelamin masih terlihat terutama pada partisipasi sekolah di jenjang pendidikan dasar, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf penduduk 25 tahun ke atas.

---

## Saran

Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah peningkatan kualitas hidup manusia melalui pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan berbagai program dan kebijakan di bidang pendidikan. Rasio murid-guru di Papua secara umum telah mencapai kondisi ideal, jumlah sarana pendidikan juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, namun apakah hal tersebut berlaku di seluruh wilayah Papua? Permasalahan paling penting di Papua saat ini adalah distribusi pendidikan yang timpang antar wilayah, sehingga arah kebijakan yang paling tepat adalah bagaimana mengurangi ketimpangan hasil pembangunan di bidang pendidikan di antara kabupaten/kota di Papua.

Program dan kebijakan tersebut memerlukan dukungan anggaran yang tidak sedikit, mengingat sebagian besar daerah di Papua berada di wilayah yang sulit dijangkau. Anggaran daerah untuk sektor pendidikan di Papua pada tahun 2015 hanya sebesar 0,84 persen dari total APBD, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan anggaran nasional untuk sektor pendidikan yaitu sebesar 20 persen. Pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran untuk sektor pendidikan sehingga berbagai program pembangunan pendidikan seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan jumlah guru, khususnya di wilayah pegunungan dapat terealisasi.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2012). *Statistik Pendidikan Indonesia 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Statistik Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2014*. Jayapura: BPS Provinsi Papua.
- Manar, A.R. (2012). Multiple Indicator Cluster Surveys Workshop Analisis Data dan Penulisan Laporan, "Bagaimana membuat Laporan MICS yang bagus?". *Disampaikan dalam Workshop Analisis Data dan Penulisan MICS*. Manokwari.
- Mankiw, Gregory, N. (2006). *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Pasay, N.H., Handayani, D., & Indrayanti, R. (2015). "... " dalam *Mozaik Demografi: Untaian Pemikiran Kependudukan dan Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rapi, Mujahidah. (tanpa tahun). "Konsep Pendidikan Anak Usia Dini".
- Simanullang, Esther. (2014). *Ketimpangan Pendidikan dan Transisi Fertilitas di Indonesia (Analisis Data Panel 1994-2012)*. Tesis. Program Pascasarjana Multidisiplin. Universitas Indonesia. Depok.
- Sulistyowati, N., & Rohayati, E. (2006). *Administrasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, Bahan Ajar Diklat Manajemen Sekolah Dasar*. Malang: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- UNESCO. (2000). *The Dakar Framework for Action, Education for All: Meeting Our Collective Commitments*. Dakar: World Education Forum.
- UNESCO. (2015). *Education For All 2000-2015: Achievements and Challenges*. France: UNESCO.
- <http://kemendikbud.go.id>

Tabel 1. Persentase Penduduk 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Prasekolah, 2016

Kabupaten/Kota	Partisipasi Prasekolah				Sampel Penduduk 0-6 Tahun
	Masih/pernah mengikuti prasekolah TA 2014/2015	Pernah mengikuti prasekolah TA 2013/2014 dan sebelum TA 2013/2014	Tidak/belum pernah mengikuti prasekolah	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	17.66	8.57	73.76	100.00	191
Jayawijaya	2.71	3.30	93.99	100.00	132
Jayapura	17.10	21.79	61.11	100.00	192
Nabire	16.02	3.78	80.20	100.00	199
Kep. Yapen	12.81	7.29	79.90	100.00	180
Biak Numfor	9.94	5.87	84.19	100.00	305
Paniai	2.22	4.12	93.66	100.00	283
Puncak Jaya	4.07	2.21	93.72	100.00	120
Mimika	8.41	10.96	80.63	100.00	294
Boven Digoel	13.07	0.30	86.63	100.00	188
Mappi	4.29	1.31	94.39	100.00	233
Asmat	1.36	0.00	98.64	100.00	370
Yahukimo	0.45	0.00	99.55	100.00	230
Peg. Bintang	3.86	1.27	94.87	100.00	199
Tolikara	0.22	0.64	99.14	100.00	181
Sarmi	23.25	9.07	67.67	100.00	157
Keerom	22.27	5.14	72.59	100.00	185
Waropen	27.01	6.06	66.93	100.00	130
Supiori	15.19	8.39	76.42	100.00	168
Mamberamo Raya	5.17	0.00	94.83	100.00	87
Nduga	0.00	0.00	100.00	100.00	207
Lanny Jaya	31.36	0.54	68.10	100.00	214
Mamberamo Tengah	0.00	0.00	100.00	100.00	108
Yalimo	0.95	2.48	96.57	100.00	104
Puncak	0.00	0.00	100.00	100.00	109
Dogiyai	4.00	0.00	96.00	100.00	152
Intan Jaya	0.59	0.51	98.91	100.00	115
Deiyai	0.00	4.86	95.14	100.00	170
Kota Jayapura	8.94	7.45	83.61	100.00	214
<b>Papua</b>	<b>8.52</b>	<b>4.56</b>	<b>86.92</b>	<b>100.00</b>	<b>5 417</b>

Sumber: Susenas 2016

Tabel 2a. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan 5 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2016

Kabupaten/Kota	Partisipasi Sekolah			Total	Sampel Penduduk Laki-laki 5 Tahun ke Atas
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	4.41	32.10	63.50	100.00	1 458
Jayawijaya	27.97	29.43	42.61	100.00	1 461
Jayapura	5.46	32.92	61.62	100.00	1 444
Nabire	7.96	29.30	62.74	100.00	1 396
Kep. Yapen	7.60	33.94	58.46	100.00	1 615
Biak Numfor	4.00	33.77	62.22	100.00	1 684
Paniai	45.54	20.48	33.97	100.00	1 329
Puncak Jaya	37.14	17.09	45.77	100.00	1 368
Mimika	6.77	25.77	67.46	100.00	1 532
Boven Digoel	13.15	21.79	65.07	100.00	1 051
Mappi	14.20	31.41	54.39	100.00	1 611
Asmat	15.51	30.78	53.71	100.00	1 317
Yahukimo	42.49	20.04	37.47	100.00	1 714
Peg. Bintang	33.78	21.35	44.87	100.00	1 337
Tolikara	50.88	20.53	28.58	100.00	1 523
Sarmi	5.27	28.14	66.59	100.00	929
Keerom	8.50	26.05	65.45	100.00	1 216
Waropen	8.41	27.89	63.70	100.00	732
Supiori	4.22	33.01	62.77	100.00	726
Mamberamo Raya	10.37	37.58	52.05	100.00	787
Nduga	56.58	17.33	26.09	100.00	1 150
Lanny Jaya	50.25	21.92	27.83	100.00	1 532
Mamberamo Tengah	42.20	28.68	29.12	100.00	726
Yalimo	46.86	28.11	25.03	100.00	954
Puncak	65.97	12.37	21.66	100.00	1 248
Dogiyai	24.30	31.17	44.53	100.00	1 228
Intan Jaya	63.11	15.42	21.47	100.00	755
Deiyai	67.26	13.58	19.16	100.00	777
Kota Jayapura	4.26	29.88	65.86	100.00	1 694
<b>Papua</b>	<b>25.83</b>	<b>25.91</b>	<b>48.25</b>	<b>100.00</b>	<b>36 294</b>

Sumber: Susenas 2016

Tabel 2b. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2016

Kabupaten/Kota	Partisipasi Sekolah			Total	Sampel Penduduk Perempuan 5 Tahun ke Atas
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	3.81	31.22	64.97	100.00	746
Jayawijaya	26.08	30.91	43.01	100.00	741
Jayapura	5.14	32.42	62.43	100.00	775
Nabire	6.17	29.04	64.79	100.00	751
Kep. Yapen	7.83	34.01	58.16	100.00	861
Biak Numfor	4.46	32.93	62.60	100.00	833
Paniai	41.96	23.10	34.94	100.00	713
Puncak Jaya	34.98	17.04	47.98	100.00	751
Mimika	5.55	24.79	69.66	100.00	836
Boven Digoel	11.64	19.80	68.56	100.00	584
Mappi	12.84	30.03	57.13	100.00	831
Asmat	16.10	31.63	52.27	100.00	693
Yahukimo	34.65	21.08	44.27	100.00	931
Peg. Bintang	28.54	23.10	48.36	100.00	736
Tolikara	46.49	22.32	31.19	100.00	817
Sarmi	4.71	26.74	68.55	100.00	522
Keerom	7.19	25.83	66.97	100.00	636
Waropen	8.03	28.56	63.40	100.00	363
Supiori	4.12	31.65	64.23	100.00	374
Mamberamo Raya	7.39	38.29	54.31	100.00	414
Nduga	48.81	21.07	30.11	100.00	619
Lanny Jaya	40.52	24.41	35.07	100.00	792
Mamberamo Tengah	35.36	32.02	32.61	100.00	370
Yalimo	41.55	30.71	27.74	100.00	504
Puncak	62.05	13.09	24.86	100.00	654
Dogiyai	19.87	31.77	48.36	100.00	642
Intan Jaya	55.67	18.38	25.95	100.00	398
Deiyai	61.02	16.83	22.16	100.00	425
Kota Jayapura	3.04	30.12	66.84	100.00	832
<b>Papua</b>	<b>22.78</b>	<b>26.53</b>	<b>50.69</b>	<b>100.00</b>	<b>19 144</b>

Sumber: Susenas 2016

Tabel 2c. Persentase Penduduk Perempuan Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2016

Kabupaten/Kota	Partisipasi Sekolah				Sampel Penduduk 5 Tahun ke Atas
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	5.04	33.03	61.93	100.00	712
Jayawijaya	29.93	27.88	42.19	100.00	720
Jayapura	5.82	33.49	60.69	100.00	669
Nabire	10.02	29.59	60.39	100.00	645
Kep. Yapen	7.37	33.86	58.77	100.00	754
Biak Numfor	3.50	34.70	61.81	100.00	851
Paniai	49.50	17.59	32.91	100.00	616
Puncak Jaya	39.74	17.15	43.12	100.00	617
Mimika	8.44	27.10	64.46	100.00	696
Boven Digoel	14.93	24.12	60.95	100.00	467
Mappi	15.62	32.86	51.52	100.00	780
Asmat	14.89	29.89	55.22	100.00	624
Yahukimo	50.75	18.94	30.31	100.00	783
Peg. Bintang	39.46	19.46	41.08	100.00	601
Tolikara	56.20	18.37	25.43	100.00	706
Sarmi	5.94	29.83	64.23	100.00	407
Keerom	10.06	26.31	63.63	100.00	580
Waropen	8.79	27.20	64.01	100.00	369
Supiori	4.33	34.35	61.32	100.00	352
Mamberamo Raya	13.40	36.85	49.75	100.00	373
Nduga	66.32	12.63	21.05	100.00	531
Lanny Jaya	61.42	19.05	19.53	100.00	740
Mamberamo Tengah	50.29	24.72	24.99	100.00	356
Yalimo	53.07	25.07	21.86	100.00	450
Puncak	70.21	11.58	18.21	100.00	594
Dogiyai	28.73	30.58	40.69	100.00	586
Intan Jaya	70.80	12.36	16.83	100.00	357
Deiyai	74.02	10.07	15.92	100.00	352
Kota Jayapura	5.63	29.61	64.76	100.00	862
<b>Papua</b>	<b>29.25</b>	<b>25.22</b>	<b>45.53</b>	<b>100.00</b>	<b>17 150</b>

Sumber: Susenas 2016

Tabel 3a. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2016

Kabupaten/Kota	Partisipasi Sekolah				Sampel Penduduk Laki-laki 7-24 Tahun ke Atas
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	0.85	75.69	23.47	100.00	296
Jayawijaya	13.41	75.78	10.80	100.00	282
Jayapura	2.29	73.82	23.89	100.00	332
Nabire	3.61	73.31	23.08	100.00	306
Kep. Yapen	2.60	75.28	22.11	100.00	387
Biak Numfor	2.06	75.48	22.46	100.00	361
Paniai	30.54	56.93	12.53	100.00	298
Puncak Jaya	34.31	47.36	18.33	100.00	273
Mimika	0.00	70.51	29.49	100.00	297
Boven Digoel	12.11	59.04	28.84	100.00	198
Mappi	9.89	64.10	26.01	100.00	405
Asmat	14.41	66.64	18.95	100.00	311
Yahukimo	25.58	51.86	22.55	100.00	382
Peg. Bintang	31.67	54.63	13.71	100.00	315
Tolikara	40.96	52.06	6.98	100.00	353
Sarmi	1.60	68.60	29.80	100.00	216
Keerom	5.57	67.22	27.21	100.00	251
Waropen	0.78	78.72	20.50	100.00	138
Supiori	0.00	70.63	29.37	100.00	157
Mamberamo Raya	0.80	75.98	23.23	100.00	212
Nduga	39.96	46.27	13.78	100.00	257
Lanny Jaya	32.04	62.83	5.13	100.00	289
Mamberamo Tengah	20.39	76.58	3.04	100.00	151
Yalimo	23.71	66.38	9.91	100.00	211
Puncak	61.47	28.79	9.74	100.00	258
Dogiyai	8.01	75.17	16.82	100.00	257
Intan Jaya	43.54	51.19	5.27	100.00	136
Deiyai	44.89	48.13	6.97	100.00	116
Kota Jayapura	0.78	72.28	26.94	100.00	335
<b>Papua</b>	<b>17.30</b>	<b>64.33</b>	<b>18.37</b>	<b>100.00</b>	<b>7 780</b>

Sumber: Susenas 2016

Tabel 3b. Persentase Penduduk Perempuan Usia 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2016

Kabupaten/Kota	Partisipasi Sekolah				Sampel Penduduk Perempuan 7-24 Tahun ke Atas
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	0.00	78.71	21.29	100.00	285
Jayawijaya	12.10	73.92	13.98	100.00	252
Jayapura	2.52	79.24	18.23	100.00	253
Nabire	3.63	76.61	19.76	100.00	249
Kep. Yapen	1.97	72.69	25.34	100.00	332
Biak Numfor	1.22	82.53	16.25	100.00	366
Paniai	33.31	52.09	14.60	100.00	199
Puncak Jaya	26.11	45.81	28.08	100.00	216
Mimika	0.53	72.53	26.93	100.00	264
Boven Digoel	10.46	61.00	28.54	100.00	174
Mappi	10.19	72.76	17.05	100.00	356
Asmat	13.86	66.40	19.74	100.00	263
Yahukimo	39.33	45.04	15.63	100.00	298
Peg. Bintang	35.00	49.62	15.38	100.00	222
Tolikara	45.83	44.46	9.71	100.00	289
Sarmi	0.79	71.18	28.04	100.00	160
Keerom	6.78	73.43	19.79	100.00	217
Waropen	2.02	67.16	30.82	100.00	153
Supiori	1.95	76.20	21.85	100.00	148
Mamberamo Raya	1.41	74.90	23.69	100.00	178
Nduga	56.03	35.52	8.45	100.00	166
Lanny Jaya	36.88	61.36	1.76	100.00	235
Mamberamo Tengah	21.94	72.23	5.83	100.00	132
Yalimo	34.75	55.88	9.37	100.00	190
Puncak	64.83	25.43	9.73	100.00	228
Dogiyai	14.85	73.97	11.18	100.00	209
Intan Jaya	65.37	32.56	2.07	100.00	121
Deiyai	65.14	29.90	4.96	100.00	88
Kota Jayapura	0.30	77.83	21.87	100.00	329
<b>Papua</b>	<b>19.52</b>	<b>63.59</b>	<b>16.89</b>	<b>100.00</b>	<b>6 572</b>

Sumber: Susenas 2016

Tabel 3c. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Usia 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2016

Kabupaten/Kota	Partisipasi Sekolah				Sampel Penduduk 7-24 Tahun ke Atas
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	0.43	77.16	22.40	100.00	581
Jayawijaya	12.78	74.89	12.32	100.00	534
Jayapura	2.40	76.29	21.31	100.00	585
Nabire	3.62	74.85	21.53	100.00	555
Kep. Yapen	2.29	74.01	23.70	100.00	719
Biak Numfor	1.67	78.77	19.57	100.00	727
Paniai	31.75	54.82	13.43	100.00	497
Puncak Jaya	30.51	46.64	22.85	100.00	489
Mimika	0.24	71.44	28.32	100.00	561
Boven Digoel	11.28	60.03	28.69	100.00	372
Mappi	10.03	68.25	21.71	100.00	761
Asmat	14.15	66.53	19.33	100.00	574
Yahukimo	32.38	48.49	19.13	100.00	680
Peg. Bintang	33.22	52.30	14.48	100.00	537
Tolikara	43.15	48.64	8.21	100.00	642
Sarmi	1.22	69.81	28.97	100.00	376
Keerom	6.11	69.98	23.91	100.00	468
Waropen	1.43	72.66	25.91	100.00	291
Supiori	0.99	73.45	25.56	100.00	305
Mamberamo Raya	1.10	75.45	23.45	100.00	390
Nduga	46.01	42.22	11.77	100.00	423
Lanny Jaya	34.03	62.23	3.74	100.00	524
Mamberamo Tengah	21.02	74.80	4.18	100.00	283
Yalimo	28.74	61.59	9.67	100.00	401
Puncak	63.10	27.16	9.74	100.00	486
Dogiyai	11.35	74.58	14.07	100.00	466
Intan Jaya	54.66	41.70	3.64	100.00	257
Deiyai	53.67	40.23	6.10	100.00	204
Kota Jayapura	0.57	74.74	24.69	100.00	664
<b>Papua</b>	<b>18.33</b>	<b>63.99</b>	<b>17.68</b>	<b>100.00</b>	<b>14 352</b>

Sumber: Susenas 2016

Tabel 4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2016

Kabupaten/Kota	APK		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	113.30	87.14	115.32
Jayawijaya	95.90	94.23	87.01
Jayapura	120.35	91.30	109.28
Nabire	103.77	99.21	116.88
Kep. Yapen	111.10	85.87	89.50
Biak Numfor	107.08	112.70	111.89
Paniai	87.51	78.23	35.75
Puncak Jaya	92.28	31.94	10.82
Mimika	109.57	98.64	154.00
Boven Digoel	96.48	87.31	38.38
Mappi	113.43	53.76	25.42
Asmat	108.62	55.25	21.34
Yahukimo	99.53	26.57	13.43
Peg. Bintang	82.87	29.16	28.00
Tolikara	65.53	65.19	46.49
Sarmi	113.97	100.56	70.71
Keerom	102.96	98.48	86.94
Waropen	104.65	[99.27]	[127.66]
Supiori	112.99	[134.97]	[57.21]
Mamberamo Raya	124.00	[48.11]	[71.27]
Nduga	65.80	42.98	1.13
Lanny Jaya	68.16	75.35	48.59
Mamberamo Tengah	92.11	[71.98]	[66.14]
Yalimo	87.80	55.18	[25.61]
Puncak	53.55	14.54	19.17
Dogiyai	98.73	94.72	66.55
Intan Jaya	79.85	[55.02]	[9.84]
Deiyai	78.82	[43.65]	[33.31]
Kota Jayapura	106.16	105.41	106.29
<b>Papua</b>	<b>94.74</b>	<b>72.07</b>	<b>66.85</b>

Sumber: Susenas 2016

Tabel 5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, 2016

Kabupaten/Kota	APS		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	98.96	99.70	83.82
Jayawijaya	90.79	89.92	74.72
Jayapura	96.21	94.74	90.60
Nabire	96.72	93.97	80.34
Kep. Yapen	97.67	96.54	76.52
Biak Numfor	95.85	99.37	95.04
Paniai	72.97	77.41	41.95
Puncak Jaya	69.88	60.99	26.93
Mimika	100.00	94.16	84.22
Boven Digoel	82.47	94.53	52.62
Mappi	89.62	78.42	63.69
Asmat	80.49	80.05	66.30
Yahukimo	64.78	67.69	29.18
Peg. Bintang	62.42	67.73	41.32
Tolikara	60.15	58.99	47.25
Sarmi	98.51	93.21	68.23
Keerom	93.39	93.48	81.44
Waropen	96.41	[100.00]	[87.36]
Supiori	98.34	[95.01]	[76.16]
Mamberamo Raya	97.57	[100.00]	[73.94]
Nduga	55.06	49.57	21.92
Lanny Jaya	65.85	71.75	54.20
Mamberamo Tengah	88.13	[82.80]	[70.57]
Yalimo	81.33	60.73	[34.15]
Puncak	43.14	21.93	21.79
Dogiyai	88.80	89.62	77.59
Intan Jaya	63.16	[41.02]	38.60
Deiyai	54.29	[50.15]	[48.48]
Kota Jayapura	98.36	99.40	76.91
<b>Papua</b>	<b>81.11</b>	<b>78.86</b>	<b>62.07</b>

Sumber: Susenas 2016

Tabel 6. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2016

Kabupaten/Kota	APM		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	97.34	73.16	72.89
Jayawijaya	87.28	78.82	66.90
Jayapura	94.30	68.65	73.22
Nabire	89.44	70.36	65.05
Kep. Yapen	93.88	64.13	56.75
Biak Numfor	88.76	74.86	64.19
Paniai	69.97	55.81	17.99
Puncak Jaya	68.83	23.13	6.60
Mimika	92.39	74.82	70.92
Boven Digoel	80.44	64.96	23.94
Mappi	89.33	35.26	15.91
Asmat	79.91	38.50	21.34
Yahukimo	64.78	18.36	10.67
Peg. Bintang	62.10	23.01	23.68
Tolikara	59.50	47.22	28.77
Sarmi	97.34	79.44	47.15
Keerom	87.16	65.99	63.37
Waropen	91.39	[69.99]	[64.94]
Supiori	91.61	[71.26]	[33.08]
Mamberamo Raya	97.07	[40.34]	[57.01]
Nduga	55.06	24.84	1.13
Lanny Jaya	64.81	69.38	44.71
Mamberamo Tengah	87.30	[66.16]	[65.20]
Yalimo	81.33	48.71	[22.75]
Puncak	43.14	13.96	13.82
Dogiyai	86.02	61.89	42.86
Intan Jaya	63.16	[12.08]	9.84
Deiyai	54.29	[20.93]	[33.31]
Kota Jayapura	92.79	82.96	61.82
<b>Papua</b>	<b>78.66</b>	<b>54.26</b>	<b>4.27</b>

Sumber: Susenas 2016

Tabel 7. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	97.54	92.92	95.34
Jayawijaya	72.21	62.43	67.44
Jayapura	97.00	94.83	95.99
Nabire	96.85	91.33	94.34
Kep. Yapen	94.09	88.40	91.33
Biak Numfor	97.75	95.55	96.70
Paniai	56.02	44.67	50.59
Puncak Jaya	57.13	41.39	50.19
Mimika	97.68	92.75	95.64
Boven Digoel	92.67	88.77	90.92
Mappi	80.92	66.02	73.59
Asmat	85.22	68.09	76.54
Yahukimo	66.93	46.67	57.05
Peg. Bintang	64.88	46.09	55.74
Tolikara	50.99	29.25	41.05
Sarmi	95.98	89.77	93.17
Keerom	93.97	87.65	91.15
Waropen	96.26	93.28	94.81
Supiori	99.01	94.68	96.87
Mamberamo Raya	89.85	76.92	83.43
Nduga	35.62	13.96	25.90
Lanny Jaya	53.54	20.93	37.82
Mamberamo Tengah	43.74	23.62	34.04
Yalimo	43.10	23.06	33.43
Puncak	42.21	26.92	34.79
Dogiyai	71.84	53.82	62.72
Intan Jaya	29.38	18.30	23.61
Deiyai	34.29	14.31	24.84
Kota Jayapura	99.00	97.31	98.23
<b>Papua</b>	<b>76.72</b>	<b>64.60</b>	<b>71.02</b>

Sumber: Susenas 2016

Tabel 8. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	100.00	100.00	100.00
Jayawijaya	83.45	79.00	81.41
Jayapura	99.59	100.00	99.78
Nabire	98.38	97.06	97.79
Kep. Yapen	97.92	97.67	97.80
Biak Numfor	100.00	100.00	100.00
Paniai	78.41	58.03	69.19
Puncak Jaya	81.09	80.43	80.82
Mimika	100.00	100.00	100.00
Boven Digoel	95.45	95.44	95.45
Mappi	96.09	87.54	92.19
Asmat	95.89	92.40	94.18
Yahukimo	85.75	75.66	80.87
Peg. Bintang	87.03	72.04	80.07
Tolikara	71.43	53.91	63.53
Sarmi	98.92	98.60	98.76
Keerom	95.97	90.84	93.95
Waropen	100.00	100.00	100.00
Supiori	100.00	98.70	99.40
Mamberamo Raya	100.00	100.00	100.00
Nduga	77.51	51.15	69.26
Lanny Jaya	72.98	69.67	71.77
Mamberamo Tengah	57.75	66.24	62.05
Yalimo	73.42	56.84	64.62
Puncak	72.30	54.70	63.55
Dogiyai	97.29	84.80	91.15
Intan Jaya	58.43	37.67	44.98
Deiyai	69.93	27.32	53.51
Kota Jayapura	100.00	99.82	99.93
<b>Papua</b>	<b>90.11</b>	<b>83.47</b>	<b>87.12</b>

Sumber: Susenas 2016

Tabel 9. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	96.65	90.54	93.71
Jayawijaya	69.04	58.40	63.77
Jayapura	95.96	92.95	94.54
Nabire	96.33	89.49	93.19
Kep. Yapen	92.40	84.49	88.53
Biak Numfor	96.87	94.10	95.51
Paniai	49.48	41.25	45.49
Puncak Jaya	50.07	31.78	41.84
Mimika	97.05	90.71	94.44
Boven Digoel	92.05	86.42	89.66
Mappi	74.52	58.54	66.45
Asmat	81.59	60.49	70.79
Yahukimo	59.83	35.92	48.14
Peg. Bintang	58.80	39.72	49.41
Tolikara	44.55	21.75	34.08
Sarmi	94.99	86.20	91.12
Keerom	93.28	86.82	90.30
Waropen	95.12	91.01	93.15
Supiori	98.61	93.31	95.94
Mamberamo Raya	85.12	65.30	75.40
Nduga	21.49	7.86	14.90
Lanny Jaya	49.17	14.64	31.83
Mamberamo Tengah	40.97	14.17	28.19
Yalimo	35.81	12.68	24.95
Puncak	32.91	17.79	25.63
Dogiyai	64.35	45.35	54.66
Intan Jaya	23.20	10.11	16.90
Deiyai	22.42	11.57	17.02
Kota Jayapura	98.64	96.62	97.68
<b>Papua</b>	<b>72.39</b>	<b>59.11</b>	<b>66.06</b>

Sumber: Susenas 2016

Tabel 10. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	8.82	8.53	8.68
Jayawijaya	7.10	5.62	6.38
Jayapura	9.57	8.89	9.25
Nabire	9.30	8.55	8.96
Kep. Yapen	9.00	8.11	8.57
Biak Numfor	9.48	8.96	9.23
Paniai	4.49	3.30	3.92
Puncak Jaya	4.20	3.29	3.79
Mimika	9.99	9.20	9.66
Boven Digoel	8.85	7.35	8.18
Mappi	6.48	4.68	5.60
Asmat	5.94	4.01	4.96
Yahukimo	4.85	2.64	3.77
Peg. Bintang	5.78	3.86	4.84
Tolikara	4.50	2.15	3.43
Sarmi	8.61	7.66	8.18
Keerom	8.61	7.32	8.04
Waropen	9.43	8.71	9.08
Supiori	8.92	7.58	8.26
Mamberamo Raya	7.63	5.86	6.75
Nduga	2.50	1.14	1.89
Lanny Jaya	4.83	2.13	3.53
Mamberamo Tengah	3.95	2.13	3.07
Yalimo	4.13	2.16	3.18
Puncak	2.54	1.65	2.11
Dogiyai	5.96	4.13	5.04
Intan Jaya	2.73	1.52	2.10
Deiyai	2.43	0.88	1.70
Kota Jayapura	10.83	10.34	10.61
<b>Papua</b>	<b>7.08</b>	<b>5.73</b>	<b>6.45</b>

Sumber: Susenas 2016

Tabel 11. Persentase Penduduk Laki-laki 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2016

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki							Jumlah	Jumlah Sampel
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD/MI/SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMPLB/Paket B	SMA/MA/SMLB/Paket C	D1/D2	D3	D4/S1/S2/S3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Merauke	11.94	39.04	13.15	26.63	0.12	1.65	7.46	100.00	577
Jayawijaya	35.40	19.57	11.86	25.31	0.00	0.34	7.51	100.00	535
Jayapura	7.13	33.75	15.38	33.66	0.34	0.57	9.17	100.00	557
Nabire	8.66	37.11	11.91	29.63	0.53	2.40	9.76	100.00	551
Kepulauan Yapen	11.50	37.50	11.67	28.49	0.50	1.19	9.14	100.00	614
Biak Numfor	9.97	33.49	12.82	31.91	1.17	1.39	9.24	100.00	588
Paniai	51.47	26.39	5.07	15.06	0.00	0.01	1.98	100.00	478
Puncak Jaya	56.55	29.31	1.48	9.61	0.00	0.61	2.45	100.00	588
Mimika	5.71	26.86	12.84	45.82	0.54	1.13	7.11	100.00	621
Boven Digoel	13.51	33.78	6.57	39.48	0.00	0.66	6.00	100.00	436
Mappi	44.70	24.77	6.37	17.95	0.54	0.89	4.77	100.00	537
Asmat	40.48	34.95	4.32	19.15	0.21	0.00	0.90	100.00	423
Yahukimo	47.90	33.66	5.24	11.12	0.00	0.55	1.53	100.00	663
Pegunungan Bintang	45.59	26.12	6.24	17.10	0.00	0.19	4.74	100.00	487
Tolikara	58.49	14.44	7.63	15.54	0.00	0.29	3.62	100.00	551
Sarmi	13.64	35.28	11.68	34.19	0.38	0.90	3.94	100.00	378
Keerom	13.19	36.38	11.20	35.19	0.42	0.23	3.39	100.00	463
Waropen	11.87	31.93	13.30	29.81	0.55	1.11	11.43	100.00	258
Supiori	13.22	35.53	11.57	33.09	0.00	2.58	4.02	100.00	257
Mamberamo Raya	20.66	37.56	12.92	28.39	0.00	0.00	0.47	100.00	257
Nduga	74.38	20.89	0.46	4.27	0.00	0.00	0.00	100.00	400
Lanny Jaya	53.08	22.19	5.42	14.85	0.00	0.00	4.45	100.00	536
Mamberamo Tengah	61.19	19.23	4.42	14.06	0.68	0.00	0.42	100.00	240
Yalimo	64.07	13.61	4.33	12.53	0.00	0.11	5.35	100.00	335
Puncak	76.47	10.53	3.45	6.44	0.43	1.99	0.69	100.00	460
Dogiyai	31.96	40.74	11.51	14.68	0.00	0.00	1.10	100.00	434
Intan Jaya	78.24	8.32	2.15	7.15	0.44	1.51	2.19	100.00	288
Deiyai	76.82	10.28	6.65	5.59	0.00	0.00	0.66	100.00	349
Kota Jayapura	7.40	21.17	11.88	41.92	0.41	2.25	14.99	100.00	644
<b>Papua</b>	<b>32.28</b>	<b>27.19</b>	<b>9.01</b>	<b>24.34</b>	<b>0.26</b>	<b>0.92</b>	<b>6.01</b>	<b>100.00</b>	<b>1 350</b>

Sumber: Susenas 2016

Tabel 12. Persentase Penduduk Perempuan 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2016

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki							Jumlah	Jumlah Sampel
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD/MI/SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMPLB/Paket B	SMA/MA/SMLB/Paket C	D1/D2	D3	D4/S1/S2/S3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Merauke	14.49	38.96	10.56	27.02	0.68	2.26	6.03	100.00	539
Jayawijaya	45.42	20.05	10.01	21.85	0.08	1.09	1.49	100.00	544
Jayapura	11.09	39.99	11.48	27.16	0.41	2.24	7.63	100.00	528
Nabire	14.71	37.20	11.16	26.10	0.22	3.65	6.96	100.00	487
Kepulauan Yapen	19.00	35.90	11.83	25.52	0.29	1.39	6.08	100.00	550
Biak Numfor	14.08	34.88	10.41	30.06	1.47	1.25	7.86	100.00	609
Paniai	59.69	28.27	4.83	6.37	0.00	0.00	0.85	100.00	452
Puncak Jaya	63.40	26.55	1.73	6.97	0.00	0.59	0.75	100.00	487
Mimika	12.33	30.14	10.12	35.17	1.72	3.21	7.32	100.00	536
Boven Digoel	21.26	42.17	8.96	24.13	0.20	1.24	2.04	100.00	350
Mappi	58.55	24.31	5.62	8.15	0.51	0.57	2.29	100.00	513
Asmat	61.29	29.94	3.42	5.36	0.00	0.00	0.00	100.00	420
Yahukimo	71.46	22.46	3.24	2.68	0.00	0.10	0.05	100.00	581
Pegunungan Bintang	65.20	17.73	5.10	8.47	0.00	1.51	1.98	100.00	425
Tolikara	81.92	8.88	2.67	5.15	0.22	0.45	0.72	100.00	502
Sarmi	21.75	38.39	11.92	20.94	0.38	1.88	4.73	100.00	308
Keerom	24.07	39.19	8.36	22.69	0.34	1.12	4.23	100.00	431
Waropen	14.33	36.03	10.89	28.60	0.45	0.85	8.85	100.00	266
Supiori	27.59	33.53	9.87	20.86	0.18	2.08	5.89	100.00	239
Mamberamo Raya	35.50	39.35	15.30	9.84	0.00	0.00	0.00	100.00	236
Nduga	91.87	7.38	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	100.00	361
Lanny Jaya	80.61	9.31	3.82	5.30	0.00	0.00	0.97	100.00	515
Mamberamo Tengah	80.94	9.82	6.72	2.52	0.00	0.00	0.00	100.00	247
Yalimo	79.79	12.07	2.84	4.63	0.00	0.00	0.67	100.00	310
Puncak	83.67	8.84	3.32	3.08	0.00	1.01	0.09	100.00	453
Dogiyai	49.78	35.06	10.50	4.66	0.00	0.00	0.00	100.00	433
Intan Jaya	87.24	6.81	1.46	3.53	0.00	0.00	0.97	100.00	290
Deiyai	93.54	4.63	0.54	1.29	0.00	0.00	0.00	100.00	294
Kota Jayapura	9.67	24.42	11.62	35.26	0.00	3.89	15.13	100.00	652
<b>Papua</b>	<b>44.09</b>	<b>25.52</b>	<b>7.45</b>	<b>17.12</b>	<b>0.30</b>	<b>1.37</b>	<b>4.15</b>	<b>100.00</b>	<b>12 558</b>

Sumber: Susenas 2016

Tabel 13. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2016

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki							Jumlah	Jumlah Sampel
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD/MI/ SDLB/Paket A	SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	SMA/MA/ SMLB/Paket C	D1/D2	D3	D4/S1/ S2/S3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Merauke	13.16	39.00	11.92	26.82	0.38	1.94	6.78	100.00	1 116
Jayawijaya	40.29	19.81	10.96	23.62	0.04	0.71	4.57	100.00	1 079
Jayapura	8.97	36.65	13.57	30.64	0.37	1.35	8.45	100.00	1 085
Nabire	11.42	37.15	11.56	28.02	0.39	2.97	8.48	100.00	1 038
Kepulauan Yapen	15.14	36.73	11.75	27.05	0.40	1.29	7.65	100.00	1 164
Biak Numfor	11.93	34.15	11.67	31.03	1.31	1.33	8.58	100.00	1 197
Paniai	55.40	27.29	4.96	10.90	0.00	0.01	1.44	100.00	930
Puncak Jaya	59.57	28.09	1.59	8.45	0.00	0.60	1.70	100.00	1 075
Mimika	8.45	28.21	11.72	41.42	1.03	1.99	7.19	100.00	1 157
Boven Digoel	17.00	37.55	7.65	32.58	0.09	0.92	4.22	100.00	786
Mappi	51.51	24.55	6.00	13.13	0.52	0.74	3.55	100.00	1 050
Asmat	51.02	32.41	3.86	12.16	0.10	0.00	0.44	100.00	843
Yahukimo	59.38	28.20	4.27	7.00	0.00	0.34	0.81	100.00	1 244
Pegunungan Bintang	55.13	22.04	5.69	12.91	0.00	0.83	3.40	100.00	912
Tolikara	69.21	11.90	5.36	10.79	0.10	0.36	2.29	100.00	1 053
Sarmi	17.31	36.69	11.79	28.19	0.38	1.34	4.30	100.00	686
Keerom	18.04	37.63	9.93	29.62	0.38	0.63	3.77	100.00	894
Waropen	13.06	33.92	12.13	29.23	0.50	0.98	10.18	100.00	524
Supiori	20.31	34.54	10.73	27.05	0.09	2.33	4.95	100.00	496
Mamberamo Raya	28.03	38.45	14.11	19.18	0.00	0.00	0.24	100.00	493
Nduga	82.23	14.83	0.26	2.69	0.00	0.00	0.00	100.00	761
Lanny Jaya	66.35	15.98	4.65	10.25	0.00	0.00	2.77	100.00	1 051
Mamberamo Tengah	70.71	14.69	5.53	8.50	0.35	0.00	0.22	100.00	487
Yalimo	71.66	12.87	3.61	8.72	0.00	0.06	3.09	100.00	645
Puncak	79.97	9.71	3.38	4.81	0.22	1.51	0.40	100.00	913
Dogiyai	40.98	37.87	11.00	9.61	0.00	0.00	0.54	100.00	867
Intan Jaya	82.93	7.53	1.79	5.27	0.21	0.72	1.55	100.00	578
Deiyai	84.73	7.61	3.76	3.55	0.00	0.00	0.35	100.00	643
Kota Jayapura	8.44	22.66	11.76	38.87	0.22	3.00	15.05	100.00	1 296
<b>Papua</b>	<b>37.84</b>	<b>26.40</b>	<b>8.28</b>	<b>20.94</b>	<b>0.28</b>	<b>1.13</b>	<b>5.14</b>	<b>100.00</b>	<b>26 003</b>

Sumber: Susenas 2016

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA**

Jl. Dr. Samratulangi Dok II Jayapura 99112  
Telepon: 0967-534519, 533028 (Hunting) Fax: 536490  
Email: bps9400@bps.go.id Homepage: <http://papua.bps.go.id>

